

BAB IV

KEBIJAKAN FORMULASI PERUMUSAN NORMA BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGA POLRI DI MASA MENDATANG

4.1. Pengaturan Bantuan Hukum dalam Beberapa Konvensi Internasional

4.1.1. Pengaturan Bantuan Hukum pada *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) tanggal 10 Desember 1948

Pengaturan Perlindungan Hukum yang memuat ketentuan adanya norma bantuan hukum, pada *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) terdiri dari :

Article 6 *"Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law".*¹ (Terjemahan bebasnya : "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada".)

Article 7 *"All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination".*² (Terjemahan bebasnya : "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas **perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi**. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu".)

Article 8 *"Everyone has the right to an effective bay the competent national tribunals for violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law".*³ (Terjemahan bebasnya : "Setiap orang berhak atas **bantuan yang efektif dari peradilan nasional yang kompeten** untuk tindakan pelanggaran hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum".)

Article 11 (1) *"Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public*

¹ United Nation (UN), *United Nation Universal Declaration of Human Right 1948*, (NY, lexmercatoria.org), p.2

² *Ibid.*, p.3

³ *Ibid.*,

trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence".⁴ (Terjemahan bebasnya : " Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, yang mana **dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya**".)

Berkaitan dengan Tujuan adalah tercantum dalam *Preamble Universal Declaration of Human Rights* (Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) "*The promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms*".⁵ (Terjemahan bebasnya : "Untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi".) Termasuk juga "*To secure their universal and effective recognition and observance*".⁶ (Terjemahan bebasnya : "Menjamin penghargaan dan penghormatan umum secara universal dan efektif".)

Dalam identifikasi terhadap pengaturan perlindungan hukum yang memuat ketentuan adanya norma bantuan hukum, diuraikan dalam Tabel : 13 tentang Pengaturan Perlindungan Hukum pada *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) sebagai berikut :

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.* p. 1

⁶ *Ibid.* p.2

Tabel 17 : Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Universal Declaration of Human Rights*** (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR PERLINDUNGAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN LINKUM	HAK ATAS PENGAKUAN DI DEPAN HUKUM	TUJUAN PERLINDUNGAN HUKUM	AZAS PERSAMAAN HAK	BERHAK ATAS BANTUAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Article 6 "Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law";	Setiap orang	Article 6 "Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada";	Tercantum dalam Mukadimah/ Pembukaan : 1. Untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi; 2. Menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif.	Article 7 "Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yg mengarah pada diskriminasi semacam itu" Article 11 (1) "Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah , sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, yang mana dia memperoleh semua jaminan yg diperlukan untuk	Article 8 "Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari peradilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum"
2.	Article 7 "All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination";					
3.	Article 8 "Everyone has the right to an effective bay the competent national tribunals for violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law";					
4.	Article 11 (1) "Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for hid defence";					

					pembela nya".	
--	--	--	--	--	------------------	--

Sumber : bahan hukum primer diolah

Berdasarkan uraian dan paparan Tabel 17 tersebut, diketahui tentang pemberian bantuan hukum bagi setiap orang merupakan hak asasi yang secara tegas di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) disebutkan pada artikel 6, artikel 7, artikel 8 dan artikel 9. Hal ini membawa konsekuensi bagi Negara Indonesia untuk mematuhi tidak boleh melanggar, dan mengaturnya dalam suatu undang-undang, sehingga menjadi tanggung jawab negara.

Dengan demikian, cukup tepat apabila dalam skala yang lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang. Oleh karena diberikan undang-undang, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, sehingga apabila ada pihak yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, pada *Article 8 Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) menentukan : Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari peradilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

⁷ I Gede Arya B. *Op.Cit.*, hlm. 229.

4.1.2. Pengaturan Bantuan Hukum pada *Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*/Konvensi untuk

Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar (Konvensi

Eropa tentang Hak Asasi Manusia) tanggal 4 November 1950

Pengaturan Bantuan Hukum pada *Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*/Konvensi untuk

Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar (Konvensi

Eropa tentang Hak Asasi Manusia) terdiri dari :

Section I : Rights and freedoms, Article 6 : Right to a fair trial (3) b, c : "Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights"; b "To have adequate time and facilities for the preparation of his defence"; c "To defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require".⁸

(Terjemahan bebasnya : Bagian I : Hak dan Kebebasan, Pasal 6 : Hak atas pengadilan yang adil, Angka 3 "Setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya berhak untuk" : Huruf b : "diberikan cukup waktu dan kemudahan untuk menyiapkan pembelaan"; Huruf c : "Membela dirinya sendiri atau melalui **bantuan hukum** pilihannya sendiri, atau bilamana dia tidak memiliki cukup dana untuk membayar bantuan hukum, diberikan **bantuan hukum** dengan cuma-cuma bilamana hal itu perlu demi kepentingan keadilan.)

Berkaitan dengan Tujuan tercantum dalam *Preamble Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (Pembukaan

Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar)

"Aims at securing the universal and effective recognition and observance of the rights therein declared". (Terjemahan bebasnya : "Untuk menjamin diakuinya

dan ditaatinya secara universal dan efektif hak yang dinyatakan dalam

deklarasi") Termasuk juga *"Aim is to be pursued is the maintenance and further*

⁸ Council of Europe, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols No. 11 and 14*, European Treaty Series - No. 5 (Rome, 1950), p. 3.

realisation of human rights and fundamental freedoms".⁹ (Terjemahan bebasnya : "Memelihara dan terus meningkatkan perwujudan Hak Asasi dan Kebebasan Mendasar Manusia".)

Berpedoman pada tabel : 17 di bawah ini dapat dipahami perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada **Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar** (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) sebagai berikut :

Tabel 18 : Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms***/Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) tanggal 4 November 1950.

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANKUM	SUBJEK HUKUM YANG MEDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANTUAN HUKUM	TUJUAN BANKUM	HAK DAN MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Article 6 : Right to a fair trial (3)b, c : "Everyone charged with a criminal offence has the following minimum rights"; b "To have adequate time and facilities for the preparation of his defence"; c "To defend himself in person or through legal assistance of his own choosing or, if he has not sufficient means to pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require".</p>	Setiap orang	Berhak	<p>Tercantum dalam Pembukaan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menjamin diakuinya dan ditaatinya secara universal dan efektif hak yang dinyatakan dalam deklarasi; 2. Memelihara dan terus meningkatkan perwujudan Hak Asasi dan Kebebasan Mendasar Manusia. 	<p>Article 6 : Hak atas pengadilan yang adil (3) b, c : "Setiap orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya berhak untuk" : b. "diberikan cukup waktu dan kemudahan untuk menyiapkan pembelaan ; c. "Membela dirinya sendiri atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri, atau bilamana dia tidak memiliki cukup dana untuk membayar bantuan hukum, diberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma bilamana hal itu perlu demi kepentingan keadilan.</p>

Sumber : bahan hukum primer diolah

⁹ *Ibid.*, p.2.

Atas dasar paparan dalam Tabel 18 tersebut di atas, maka dipahami di dalam *Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*/Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia), ketentuan bantuan hukum diatur dalam artikel 6 huruf b dan c.

Konvensi tersebut di atas, mengisyaratkan terhadap masalah penanggulangan kejahatan pada hakikatnya tidaklah dapat dipisahkan dengan ide perlindungan Hak Asasi Manusia serta penegakan keadilan, yang secara universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia, termasuk hal untuk membela diri atau mendapat bantuan hukum.¹⁰

4.1.3. Pengaturan Bantuan Hukum pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) tanggal 16 Desember 1966

Pengaturan Bantuan Hukum pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) terdiri dari :

Article 14 (3) d "To be tried in his presence, and to defend himself in person or legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it".¹¹ (Terjemahan bebasnya : "Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan **bantuan hukum**

¹⁰ Dalam O.C. Kaligis, *Op.Cit.*, hlm. 52-53.

¹¹ General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly, entry into force 23 March 1976, p. 9.

demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya".)

Article 16 "Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law".¹² (Terjemahan bebasnya : "Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada".)

Article 26 "All person are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the Law. In his respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all person equal and effective protection against discrimination on any ground such as rase, color, sex, language, riligion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status".¹³

(Terjemahan bebas : "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain".)

Berhubungan dengan Tujuan tercantum dalam *Preamble International Covenant on Civil and Political Rights* (Pembukaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) "To promote universal respect for, and observance of human rights and freedoms".¹⁴ (Terjemahan bebasnya : "Untuk memajukan penghormatan universal dan penataan atas hak asasi dan kebebasan manusia".)

Selanjutnya dapat dibaca dalam Tabel : 19 di bawah ini tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada ***International Covenant on Civil and Political Rights*** (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) sebagai berikut :

¹² *Ibid.*, p. 10.

¹³ *Ibid.*, p. 13-14.

¹⁴ *Ibid.*, p. 1

Tabel 19 : Pengaturan Bantuan Hukum pada ***International Covenant on Civil and Political Rights*** (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)

URUT NO	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MEDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	AZAS PERSAMAAN HAK	HAK DAN MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Article 14 (3) d "To be tried in his presence, and to defend himself in person or legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it."	Setiap orang	Ber hak	Tercantum dalam Pembukaan antara lain : Untuk memajukan penghormatan universal; Penataan atas hak asasi dan kebebasan manusia.	Article 26 "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yg sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain".	Article 14 (3) d "Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan , dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya "
2.	Article 16 "Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law";					
3.	Article 26 "All person are equal before the law and are entitled whithout any discrimination to the equal protection of the Law. In his respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all person equal and effective protection against discrimination on any ground such as rase, color, sex, language, riligion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status".					

Sumber : bahan hukum primer diolah

Pengaturan Bantuan Hukum pada ***International Covenant on Civil and Political Rights*** (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) sebagaimana diuraikan dalam Tabel 19 di atas, diatur dalam artikel 26 yang menunjukkan sifat universalnya dari hak atas kedudukan hukum yang sama dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun, bagi

semua orang. Hal tersebut dimaksudkan untuk memajukan penghormatan universal dan sekaligus untuk penataan atas hak asasi dan kebebasan manusia.¹⁵

Bantuan Hukum pada ***Covenant on Civil and Political Rights*** (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) diatur pada **Article 14 (3) d** "Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan **bantuan hukum demi kepentingan keadilan**, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya".

4.1.4. Pengaturan Bantuan Hukum pada *Access to Lawyer and Legal Services*

Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Access to Lawyer and Legal Services*** (Akses kepada Advokat dan Pelayanan Hukum) terdiri dari :

Pada bagian B "*Basic Principles of The Role of Lawyers*" tentang "*Access to Lawyer and Legal Services*"

- (1) *All person are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings;*
- (2) *Governments shall ensure that efficient procedures responsive mechanisms for effective and equal access To lawyers are provided for all persons within their territory and subject to their jurisdiction, without distinction of any kind, such as discrimination based on race, colour, ethnic origin, sex, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status;*
- (3) *Governments shall ensure the provision of sufficient funding and other resources for legal services to the poor, and as necessary, to other disadvantaged persons. Professional associations of lawyers shall cooperate in the organization and provision of services, facilities and other resources;*
- (4) *Governments and professional associations of lawyer shall promote the programmes to inform the public about their rights and duties under the law and the important role of lawyers in protecting their*

¹⁵ General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, *Preamble International Covenant on Civil and Political Rights*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly, entry into force 23 March 1976, p. 1.

*fundamental freedoms. Special attention should be given to assisting the poor and other disadvantaged persons so as to enable them to assert their rights and where necessary call upon the assistance of lawyers.*¹⁶ (Terjemahan bebasnya :

Pada bagian B "Prinsip Dasar tentang Peran Advokat" tentang "Akses kepada Advokat dan Pelayanan Hukum":

- (1) Semua orang berhak untuk minta bantuan seorang advokat mengenai pilihan mereka untuk melindungi dan menetapkan hak-hak mereka dan untuk melindungi mereka pada semua dalam proses pengadilan pidana.
- (2) Pemerintah harus memastikan bahwa prosedur yang efisien mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara kepada advokat yang disediakan kepada semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa ada perbedaan dalam hal apapun, seperti misalnya diskriminasi yang berdasarkan pada ras, warna kulit, asal usul etnis, jeni kelamin, agama, pandangan politik atau lain-lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, status ekonomi atau lainnya.
- (3) Pemerintah harus memastikan tersedianya dana dan sumber daya lainnya yang cukup untuk pelayanan hukum bagi orang-orang miskin dan kalau perlu, kepada orang-orang lain yang kurang beruntung. Perhimpunan advokat profesional harus bekerja sama dalam organisasi dan penyediaan layanan, fasilitas dan sumber daya lainnya.
- (4) Pemerintah dan perhimpunan advokat profesional akan memajukan program untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum dan peranan penting advokat dalam melindungi kebebasan-kebebasan mendasar mereka. Perhatian khusus harus ditujukan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang kurang mampu sehingga memungkinkan mereka untuk menyatakan hak-hak mereka dan untuk minta bantuan advokat.)

Berkaitan dengan Tujuan tercantum dalam *Preamble Basic Principles of The Role of Lawyers* "The achievement of international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms without distinction as to race, sex, language, or religion";¹⁷ (Terjemahan bebasnya : "Terwujudnya kerjasama internasional dalam memajukan dan

¹⁶ Secretariat United Nations, *Eighth United Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders, Havana 27 Agustus-7 September 1990*, (New York, Secretariat United Nations, 1991), p.120.

¹⁷ *Ibid.*, p.1

mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama”;) **dan** “*That a detained person shall be entitled to have the assistance of and to communicate and consult with, legal counsel*”; (Terjemahan bebasnya : “Seorang yang ditahan berhak untuk mendapat bantuan dan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan Penasihat Hukum”;) **serta** “*To adequate legal assistance at all stages of the proceedings*”;¹⁸ (Terjemahan bebasnya : “Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan”;) Termasuk juga “*Providing legal services to all in need of them*”;¹⁹ (Terjemahan bebasnya : “Memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkannya”).)

Berdasarkan pada tabel : 20 di bawah ini dapat diketahui perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Access to Lawyer and Legal Services*** (Akses kepada Advokat dan Pelayanan Hukum) sebagai berikut :

Tabel 20 : Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Eighth United Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders*** (Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa kedelapan tentang Pencegahan

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

dan Perlakuan Pelaku Kejahatan) di Havana tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990.

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	AZAS PERSAMAAN HAK	MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pada bagian B "Basic Principles of The Role of Lawyers" tentang "Access to Lawyer and Legal Services"</p> <p><i>(1) All person are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings;</i></p> <p><i>(2) Governments shall ensure that efficient procedures responsive mechanisms for effective and equal access To lawyers are provided for all persons within their territory and subject to their jurisdiction, without distinction of any kind, such as discrimination based on race, colour, ethnic origin, sex, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status;</i></p> <p><i>(3) Governments shall ensure the provision of sufficient funding and other resources for legal services to the poor, and as necessary, to other disadvantaged persons. Professional associations of lawyers shall cooperate in the organization and provision of services, facilities and other resources;</i></p> <p><i>(4) Governments and professional associations of lawyer shall promote the programmes to inform the public about their rights and duties under the law and the important role of lawyers in protecting their fundamental freedoms. Special attention should be given to assisting the poor and other disadvantaged persons so as to enable them to assert their rights and where necessary call upon the assistance of lawyers.</i></p>	Setiap orang	Berhak	<p>Tercantum dalam Pembukaan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kerja sama internasional dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama; 2. Seorang yang ditahan berhak untuk mendapat bantuan dan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan Penasihat Hukum; 3. Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan 	<p>Pada bagian B "Basic Principles of The Role of Lawyers" tentang "Access to Lawyer and Legal Services" (2)</p> <p>Pemerintah harus memastikan bahwa prosedur yang efisien mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara kepada advokat yang disediakan kepada semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa ada perbedaan dalam hal apapun, seperti misalnya diskriminasi yang berdasarkan pada ras, warna kulit, asal usul etnis, jeni</p>	<p>Pada bagian B "Basic Principles of The Role of Lawyers" tentang "Access to Lawyer and Legal Services" (3)</p> <p>Pemerintah harus memastikan tersedianya dana dan sumber daya lainnya yang cukup untuk pelayanan hukum bagi orang-orang miskin dan kalau perlu kepada orang-orang lain yang kurang beruntung, perhimpunan advokat profesional harus bekerja sama dalam organisasi dan penyediaan layanan, fasilitas dan sumber daya lainnya;</p> <p>(4) Pemerintah dan perhimpunan advokat profesional akan memajukan program untuk memberikan kepada</p>

				proses pengadilan; 4. Memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkan	kelamin, agama, pandangan politik atau lain-lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, status ekonomi atau lainnya.	masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum dan peranan penting advokat dalam melindungi kebebasan kebebasan mendasar mereka, perhatian khusus harus ditujukan kepada orang-orang miskin dan orang yang kurang mampu sehingga memungkinkan mereka untuk meminta bantuan advokat.
--	--	--	--	---	--	--

Sumber : bahan hukum primer diolah

Pengaturan Bantuan Hukum pada *Eighth United Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders*, sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 20, juga menyatakan dalam konggres internasional tersebut, dimuat dalam Bagian B "Prinsip Dasar tentang Peran Advokat" tentang "Akses kepada Advokat dan Pelayanan Hukum" khususnya pada ayat (2), yang menekankan "Pemerintah harus memastikan bahwa prosedur yang efisien mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara kepada advokat yang disediakan kepada semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa ada perbedaan dalam hal apapun. Hal tersebut dimaksudkan agar terwujudnya

kerjasama internasional dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan mendasar tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama; kemudian terhadap seorang yang ditahan berhak untuk mendapat bantuan dan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan Penasihat Hukum; Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan dan memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkannya.²⁰

Pengaturan Bantuan Hukum pada *Eighth United Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders*, dalam Tabel 20 sebagaimana bagian B "Prinsip Dasar tentang Peran Advokat" tentang "Akses kepada Advokat dan Pelayanan Hukum" pada ayat (3) Pemerintah harus memastikan tersedianya dana dan sumber daya lainnya yang cukup untuk pelayanan hukum bagi orang-orang miskin dan kalau perlu, kepada orang-orang lain yang kurang beruntung. Perhimpunan advokat profesional harus bekerja sama dalam organisasi dan penyediaan layanan, fasilitas dan sumber daya lainnya. Khusus ayat (4) Pemerintah dan perhimpunan advokat profesional akan memajukan program untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum dan peranan penting advokat dalam melindungi kebebasan-kebebasan mendasar mereka. Perhatian khusus harus ditujukan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang kurang mampu sehingga memungkinkan mereka untuk menyatakan hak-hak mereka dan untuk minta bantuan advokat.

²⁰ Secretariat United Nations, *Preamble Basic Principles of The Role of Lawyers on Eighth United Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders*, Havana 27 Agustus-7 September 1990, (New York, Secretariat United Nations, 1991), p.1.

4.1.5. Pengaturan Bantuan Hukum pada *Special Safeguards In The Criminal Justice Process*

Pengaturan Bantuan Hukum pada *Special safeguards In The Criminal Justice Process* (tindakan perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana) terdiri dari :

Pada bagian C "*Basic Principles of The Role of Lawyers*" tentang "*Special Safeguards In The Criminal Justice Process*"

- (5) *Governments shall ensure that all persons are immediately informed by the competent authority of their right to be assisted by a lawyer of their own choice upon arrest or detention or when charged with a criminal offence;*
- (6) *Any such persons who do not have a lawyer shall, in all cases in which the interests of justice so require, be entitled to have a lawyer of experience and competence commensurate with the nature of the offense assigned to them in order to provide effective legal assistance, without payment by them if they lack the Sufficient means to pay for such services.*²¹ (Terjemahan bebasnya :

Pada bagian C "Prinsip Dasar tentang Peran Advokat" tentang "tindakan perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana":

- (5) Pemerintah-pemerintah harus menjamin bahwa aparat yang berwenang akan memberitahukan hak terdakwa untuk didampingi advokat pada saat ditangkap atau ditahan atau apabila dituduh dengan pelanggaran pidana.
- (6) Orang yang tidak mempunyai advokat, dalam hal bagaimanapun juga dimana kepentingan keadilan membutuhkan, berhak untuk mempunyai seorang advokat yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka untuk memberikan bantuan hukum secara efektif, tanpa bayaran oleh mereka kalau mereka kekurangan sarana yang cukup untuk membayar pelayanan tersebut.)

Berhubungan dengan Tujuan tercantum dalam *Preamble Basic Principles of The Role of Lawyers* "*That legal assistance and confidential communication with counsel should be ensured to untried prisoners*"; (Terjemahan bebasnya : "Bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan Penasihat Hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili"); **dan** "*To adequate legal assistance at all stages of the proceedings*"; (Terjemahan

²¹ *Ibid.*, p.120

bebasnya : "Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan");) **serta** "*Requires that all persons have effective acces to legal services provided by an independent legal profession*"; (Terjemahan bebasnya : "Mengharuskan semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen".)

Berpijak dari tabel : 21 di bawah ini dapat dilihat perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Special Safeguards In The Criminal Justice Process*** (tindakan perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana) sebagai berikut :

Tabel 21 : Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Eighth United Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders*** (Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa kedelapan tentang Pencegahan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan) di Havana tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990.

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANTUAN	HAK ATAS BANTUAN	TUJUAN BANTUAN	BANTUAN BAGI ORANG TIDAK MAMPU
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Pada bagian C "Basic Principles of The Role of Lawyers" tentang "Special Safeguards In The Criminal Justice Process" (5)</p> <p><i>Governments shall ensure that all persons are immediately informed by the competent authority of their right to be assisted by a lawyer of their own choice upon arrest or detention or when charged with a criminal offence;</i></p> <p>(6)</p> <p><i>Any such persons who do not have a lawyer shall, in all cases in which the interests of justice so require, be entitled to have a lawyer of experience and competence commensurate with the nature of the offense assigned to them in order to provide effective legal assistance, without payment by them if they lack the Sufficient means to pay for such services.</i></p>	Setiap orang	<p>Berhak</p> <p>Pada bagian C "Basic Principles of The Role of Lawyers" tentang "Special Safeguards In The Criminal Justice Process" (5)</p> <p>Pemerintah harus menjamin bahwa aparat yang berwenang akan memberitahukan hak terdakwa untuk didampingi advokat pada saat ditangkap atau ditahan atau apabila dituduh dengan pelanggaran pidana.</p>	<p>Tercantum dalam Pembukaan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan Penasihat Hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili; 2. Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan; 3. Mengharuskan semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen. 	<p>Pada bagian C "Basic Principles of The Role of Lawyers" tentang "Special Safeguards In The Criminal Justice Process" (6)</p> <p>Orang yang tidak mempunyai advokat, dalam hal bagaimanapun juga dimana kepentingan keadilan membutuhkan, berhak mempunyai seorang advokat yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka untuk memberikan bantuan hukum secara efektif, tanpa bayaran oleh mereka kalau mereka kekurangan sarana yang cukup untuk membayar pelayanan tersebut.</p>

Sumber : bahan hukum primer diolah

Tabel 21 tersebut di atas menjelaskan Pengaturan Bantuan Hukum Pada bagian C "Prinsip Dasar tentang Peran Advokat" tentang "tindakan perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana" khususnya pada ayat (5) menentukan : "Pemerintah-pemerintah harus menjamin bahwa aparat yang berwenang akan

memberitahukan hak terdakwa untuk didampingi advokat pada saat ditangkap atau ditahan atau apabila dituduh dengan pelanggaran pidana”.

Pengaturan Bantuan Hukum pada *Special safeguards In The Criminal Justice Process*, terdapat pada bagian C "*Basic Principles of The Role of Lawyers*" tentang "*Special Safeguards In The Criminal Justice Process*, khususnya pada ayat (6) yang menyebutkan bahwa "Orang yang tidak mempunyai advokat, dalam hal bagaimanapun juga dimana kepentingan keadilan membutuhkan, berhak untuk mempunyai seorang advokat yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka untuk memberikan bantuan hukum secara efektif, tanpa bayaran oleh mereka kalau mereka kekurangan sarana yang cukup untuk membayar pelayanan tersebut", hal tersebut dimaksudkan agar bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan Penasihat Hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili, Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan dan mengharuskan semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen.²²

4.1.6. Pengaturan Bantuan Hukum pada *Duties and Responsibilities*

Pengaturan Bantuan Hukum pada *Duties and Responsibilities* (kewajiban dan tanggung jawab) terdiri dari :

Pada bagian E "*Basic Principles of The Role of Lawyers*" tentang "*Duties and Responsibilities*"

(13) a. *Advising clients as to their legal rights and obligations and as to the working of the legal system in so far as it is relevant to the legal rights and obligations of the clients;*

(13) b. *Assisting clients in every appropriate way, and taking legal action to protect their interests;*

²² *Ibid.*, p.2

(13) c. Assisting clients before courts, tribunals or administrative authorities where appropriate;

*(14) Lawyers in protecting the rights of their clients and in promoting the cause of justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized standards and ethics of the legal profession.*²³ (Terjemahan bebasnya :

Pada bagian E "Prinsip Dasar tentang Peran Advokat" tentang "kewajiban dan tanggung jawab":

(13) a. Memberi nasehat kepada para klien mengenai hak dan kewajiban hukum mereka dan mengenai fungsi dari sistem hukum sejauh bahwa hal itu relevan dengan berfungsinya sistem hukum dan sejauh bahwa hal itu berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum para klien;

(13) b. Membantu para klien dengan setiap cara yang tepat, dan mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingannya;

(13) c. Membantu para klien di depan pengadilan, majelis atau pejabat pemerintahan, dimana sesuai.

(14) Para advokat dalam melindungi hak klien-klien dan dalam memajukan kepentingan keadilan, akan berusaha untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan hukum internasional dan setiap saat akan bertindak bebas dan tekun sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang diakui.)

Berkaitan dengan Tujuan tercantum dalam *Preamble Basic Principles of The Role of Lawyers* "*That legal assistance and confidential communication with counsel should be ensured to untried prisoners*"; (Terjemahan bebasnya : "Bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan Penasihat Hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili");) **dan** "*To adequate legal assistance at all stages of the proceedings*"; (Terjemahan bebasnya : "Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan");) **serta** "*Requires that all persons have effective acces to legal services provided by an independent legal profession*"; (Terjemahan bebasnya : "Mengharuskan semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen");) Termasuk juga "*Providing legal services to*

²³ *Ibid.*, p.3

all in need of them"; serta (Terjemahan bebasnya : "Memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkannya".)

Tabel 22 memaparkan perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Duties and Responsibilities*** (kewajiban dan tanggung jawab) sebagai berikut :

Tabel 22 : Pengaturan Bantuan Hukum pada ***Eighth United Nations Congress on the Prevention and Treatment of Offenders (Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa kedelapan tentang Pencegahan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan)*** di Havana tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990.

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPAT KAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANTUAN HUKUM	KEPENTINGAN KEADILAN
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Pada bagian E "Basic Principles of The Role of Lawyers" tentang "Duties and Responsibilities" (13)</p> <p><i>a. Advising clients as to their legal rights and obligations and as to the working of the legal system in so far as it is relevant to the legal rights and obligations of the clients;</i></p> <p><i>b. Assisting clients in every appropriate way, and taking legal action to protect their interests;</i></p> <p><i>c. Assisting in protecting the rights of their clients and in promoting the cause of justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized standards and ethics of the legal profession.</i></p> <p>(14)</p> <p><i>Lawyer in protecting the rights of their clients and in promoting the cause of justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized standards and ethics of the legal profession.</i></p>	Setiap orang	Berhak	<p>Tercantum dalam Pembukaan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan Penasihat Hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili; 2. Untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan; 3. Mengharuskan semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen; 4. Memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkan. 	<p>Pada bagian E "Basic Principles of The Role of Lawyers" tentang "Duties and Responsibilities" (14)</p> <p>Para advokat dalam melindungi hak klien-klien dan dalam memajukan kepentingan keadilan, akan berusaha untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan hukum internasional dan setiap saat akan bertindak bebas dan tekun sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang diakui.</p>

Sumber : bahan hukum primer diolah

Tabel 22 tersebut di atas menjelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada *Duties and Responsibilities* (kewajiban dan tanggung jawab), dimuat pada bagian E "*Basic Principles of The Role of Lawyers*" tentang "*Duties and Responsibilities*", khususnya dalam ayat (14) yang menyebutkan bahwa "Para advokat dalam melindungi hak klien-klien dan dalam memajukan kepentingan keadilan, akan berusaha untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan hukum internasional dan setiap saat akan bertindak bebas dan tekun sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang diakui". Hal ini dimaksudkan antara lain : agar Bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan Penasihat Hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili, sehingga mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan dan mengharuskan semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum independen, serta memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkan.²⁴

4.2. Pengaturan Bantuan Hukum dalam Perundang-Undangan di Kepolisian beberapa Negara

4.2.1. Kepolisian Philippina

Ketentuan ***Section 56 of RA 8551*** berbunyi :

"The Philippine National Police (PNP) personnel whenever they commit a criminal offense and police ethics violation, the Secretary of Justice, the Chairman of the Commission or the Chief of the PNP may authorize lawyers of their respective agencies to provide legal assistance to any member of the PNP who is facing before the prosecutor's office, the court or any competent body, a charge or charges arising from any incident which is related to the performance of his official duty: Provided, That government lawyers so authorized shall have the power to administer oaths: Provided, further, That in such cases, when necessary, as

²⁴ *Ibid.*,

determined by the Commission, a private counsel may be provided at the expense of the Government".²⁵

(Terjemahan bebasnya : "Setiap personil Philippine National Police (PNP) yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran etika polisi, Sekretaris Kehakiman, Ketua Komisi atau Kepala PNP dapat mengizinkan pengacara dari lembaga masing - masing untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap anggota PNP sebelum tindakan tersebut dilaporkan ke kantor kejaksaan, pengadilan atau badan yang kompeten, biaya atau biaya – biaya yang timbul dari setiap kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas resminya: Asalkan, pengacara pemerintah yang diberi wewenang harus memiliki kekuatan untuk mengucapkan sumpah: Asalkan, lanjut, bahwa dalam kasus tersebut, bila diperlukan, sebagaimana ditentukan oleh Komisi, Penasihat pribadi dapat diberikan dengan mengorbankan Pemerintah".)

"Model of legal protection or legal assistance from the PNP started from the request from the respondent personnel up to the resolution of the filed criminal case. Handling of criminal offense can be filed directly to courts ore in an internal disciplinary machinery as the recommendatory body to the disciplinary authority".²⁶ (Terjemahan bebasnya : "Model perlindungan hukum atau bantuan hukum dari PNP dimulai dari permintaan dari personil responden sampai dengan penyelesaian kasus kriminal. Penanganan tindak pidana dapat diajukan langsung ke pengadilan dalam disipliner internal sebagai badan direkomendasikan kepada otoritas pendisiplinan".)

"The legal aid function is placed on the Internal Affairs Service and Legal Service. There are pool of lawyers under Legal Service who are PNP officers also who can be a legal counsel of all PNP members involve in criminal offense in relation to the performance of their duty".²⁷ (Terjemahan bebasnya : "Fungsi Bantuan Hukum ditempatkan pada Internal Servis Negara dan Pelayanan Hukum. Ada pengacara di bawah Legal Service yang adalah petugas PNP juga yang bisa menjadi Penasihat Hukum semua anggota PNP terlibat dalam tindak pidana dalam kaitannya dengan kinerja tugas mereka".)

*Republic of the Philippines Congress of the Philippines Metro Manila, Tenth Congress **Republic Act No. 8551, February 25, 1998** "AN ACT PROVIDING FOR THE REFORM AND REORGANIZATION OF THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE AND FOR OTHER PURPOSES, AMENDING CERTAIN PROVISIONS OF REPUBLIC ACT NUMBERED SIXTY-NINE HUNDRED AND SEVENTY-FIVE ENTITLED, "AN ACT ESTABLISHING THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE UNDER A RE-ORGANIZED DEPARTMENT OF THE INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT, AND FOR OTHER PURPOSES". Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled:*

²⁵ The Lawphil Project, Arreland Law Foundation, *Republic of the Philippines Congress of the Philippines Metro Manila, Tenth Congress Republic Act No. 8551*, (Philipine Laws Jurisprudence and Databank, February 25, 1998), p. 18.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*,

Section 56. *Section 49 of Republic Act No. 6975 is hereby amended to read as follows: "SEC. 49. Legal Assistance ... The Secretary of Justice, the chairman of the Commission or the Chief of the PNP may authorize lawyers of their respective agencies to provide legal assistance to any member of the PNP who is facing before the prosecutor's office, the court or any competent body, a charge or charges arising from any incident which is related to the performance of his official duty: Provided, That government lawyers so authorized shall have the power to administer oaths: Provided, further, That in such cases, when necessary, as determined by the Commission, a private counsel may be provided at the expense of the Government. The Secretary of Justice, the Chairman of the Commission and the Chief of the PNP shall jointly promulgate rules and regulations to implement the provisions of this Section".²⁸*

(Terjemahan bebasnya : Republik Filipina Kongres di Filipina Metro Manila, Kongres kesepuluh **UU Republik No 8551, tanggal 25 Februari 1998** "UNDANG-UNDANG YANG DISEDIAKAN UNTUK REFORMASI DAN REORGANISASI POLISI NASIONAL FILIPINA DAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA, TENTANG PERUBAHAN BAGIAN TERTENTU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK BERNOMOR ENAM RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA BERJUDUL, "SEBUAH UNDANG-UNDANG MENEGAKKAN POLISI NASIONAL FILIPINA DI BAWAH DEPARTEMEN PEMERINTAH YANG DI-REORGANISASI URUSAN DALAM NEGERI DAN DAERAH, SERTA UNTUK KEPERLUAN LAINNYA". Disahkan oleh Senat dan DPR Filipina di Kongres sebagai berikut :

Bagian 56. bagian 49 dari UU Republik No 6975 dengan ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian 49 **Bantuan Hukum** ... Sekretaris Kehakiman, Ketua Komisi atau Kepala PNP dapat mengizinkan pengacara dari lembaga masing-masing untuk memberikan bantuan hukum kepada **setiap anggota PNP (*The Philippine National Police*) yang menghadapi di depan kantor kejahatan, pengadilan atau badan yang kompeten**, biaya atau biaya yang timbul dari setiap kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas resminya: Asalkan, pengacara pemerintah yang diberi wewenang itu harus memiliki kekuatan/kekuasaan untuk mengucapkan sumpah: Asalkan, lebih lanjut, bahwa dalam kasus tersebut, bila diperlukan, sebagaimana ditentukan oleh Komisi, **penasihat pribadi dapat diberikan dengan beban biaya Pemerintah**. Sekretaris Kehakiman, Ketua Komisi dan Kepala PNP (Polisi Nasional Philippina) bersama-sama wajib mengeluarkan peraturan untuk melaksanakan ketentuan bagian ini".)

4.2.2. Kepolisian Thailand

²⁸ *Ibid.*, p.1

Ketentuan yang mengatur perlindungan dan bantuan hukum sebagai berikut :

"The legal basis of the laws and regulations governing legal protection and legal assistance to Thailand State Police Officer is the criminal code and criminal procedure code".²⁹ (Terjemahan bebasnya : "Dasar hukum dari undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan hukum dan bantuan hukum ke Petugas Kepolisian Negara Thailand adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana".)

Terfokus pada perlindungan dan bantuan hukum diatur dalam :

"Police Regulation, Chapter 2, Article 3; If the police officers are being unlawful accuse/charges, the superior consider and assist. And if the officers are being trialed, the officers are able to ask for lawyer to represent their cases".³⁰ (Terjemahan bebasnya : "Peraturan Polisi, Bab 2, Pasal 3, Jika polisi sedang tertuduh melanggar hukum/kena biaya, atasannya mempertimbangkan dan membantu. Dan jika petugas sedang disidang pengadilan, petugas dapat meminta seorang pengacara untuk mewakili kasus mereka".)

"The handling mechanism of criminal offense and police ethics violation is the Police Discipline code and Police Code of Ethics/Moral". (Terjemahan bebasnya : "Mekanisme penanganan tindak pidana dan pelanggaran etika polisi adalah kode Disiplin Polisi dan Kode Etik atau Moral Polisi".) **dan** *"There are no handling or settlement, Police officers will bear the same penalty as ordinary citizens".* (Terjemahan bebasnya : "Tidak ada penanganan atau penyelesaian, Polisi akan menanggung hukuman yang sama sebagai warga negara biasa".)

Office of Legal Affairs and Legislation, Royal Thai Police. Headquartered in Bangkok, the RTP is divided into six broad groups :

1. *Special operations;*
2. *Crime Prevention and Suppression;*
3. *Crime Prevention and Suppression Support;*

²⁹ *Thailand State Police Officer is the criminal code and criminal procedure code*

³⁰ *Ibid.,*

4. *Education;*
5. *Servies;*
6. *Command and General Staff;*
 - *Office of Legal Affairs and Litigation;*
 - *Disciplinary Division.*³¹

Selanjutnya (Terjemahan bebasnya : Kantor Urusan Hukum dan Perundang-undangan Royal Police Thailand. Berkantor pusat di Bangkok, RTP dibagi menjadi enam kelompok besar:

1. operasi khusus;
2. Pencegahan Kejahatan dan Pemberantasan;
3. Pencegahan Kejahatan dan Dukungan Pemberantasan;
4. pendidikan;
5. servies;
6. Komando dan Staf Umum;
 - **Kantor Urusan Hukum dan Litigasi;**
 - Divisi Disiplin.)

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami apabila anggota Polisi Kerajaan Thailand melanggar hukum, maka diperlakukan sama sebagai warga negara biasa, yang selanjutnya secara struktural fungsi bantuan hukum pada Polisi Kerajaan Thailand adalah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Hukum dan Perundang-undangan Polisi Kerajaan Thailand.

4.2.3. Kepolisian Malaysia

Ketentuan yang mengatur perlindungan dan bantuan hukum sebagai berikut :

Pentingnya mengetahui dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi anggota Polisi Diraja Malaysia (PDRM), Jika terdapat anggota Polisi Diraja Malaysia (PDRM) melakukan pelanggaran kriminal dan pelanggaran kode etik. Adanya Contoh pelanggaran kriminal atau tindak pidana seperti polisi memukul, menembak orang sampai luka atau mati, menghina orang, menipu, memeras,

³¹ *Ibid.,*

menggunakan dan mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba, dan perbuatan yang merugikan orang lain. Untuk contoh pelanggaran kode etik seperti : makelar kasus, KKN, berpihak kesalah satu orang yang berperkara, pungutan liar, tidak masuk dinas tanpa keterangan yang benar, tidak proporsional dalam tugas, tidak melakukan tugas dengan benar dan lainnya.

Bagi anggota Polisi Diraja Malaysia (PDRM) yang melakukan tindak pidana sama seperti Anggota POLRI di Indonesia, untuk anggota Polisi Diraja Malaysia (PDRM) akan dikenakan hukum pidana umum yang berlaku (**Akta 593 Kanun prosedur jenayah**), dan anggota Polisi yang melanggar **akan menunjuk pengacara sendiri**, namun penuntut umum bukan dari pihak Kepolisian seperti halnya pada pelaku kejahatan umum lainnya. Untuk pelanggaran kode etik dan disiplin diatur dalam **Akta Polis 1967 (Akta 344)**, hukuman bagi pelanggar bisa denda berupa pemotongan gaji ataupun penundaan pembayaran gaji dan tunjangan, masa pemeriksaan bisa dilakukan penahanan kerja (non job) dan selama itu dia hanya berhak atas separuh gaji dan tunjangannya, kecuali tunjangan sewa rumah tetap dibayar penuh. Apabila ada polisi yang melanggar pidana, maka yang bersangkutan juga dikenakan hukuman disiplin yang keputusannya menunggu vonis pengadilan. Dimana proses hukuman disiplin dilakukan sidang disiplin seperti halnya yang berlaku di lembaga POLRI di Indonesia.³²

Model perlindungan hukum atau bantuan hukum dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM) kepada personal Polisi Diraja Malaysia, jika benar melakukan pelanggaran kriminal atau tindak pidana dan pelanggaran kode etik. Selanjutnya Polisi Diraja Malaysia (PDRM) yang melanggar hukum menunjuk pengacara sendiri selama proses pengadilan, mereka diberlakukan hukum sipil dan diadili di Mahkamah Umum. **Pihak lembaga Polisi Diraja Malaysia (PDRM) tidak menunjuk pengacara.** Sedangkan untuk pelanggaran disiplin akan dilaksanakan sidang seperti halnya di lembaga POLRI, namun bedanya anggota Polisi Diraja Malaysia yang melanggar bisa menunjuk **pembela dari luar Polisi**.³³

Mekanisme penanganan terhadap pelanggaran hukum baik pelanggaran kriminal atau tindak pidana dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personal Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Khusus untuk

³² <http://perundingtanhnegara.blogspot.com/2012/07/kanun-prosedur-jenayah-akta-593.htm> Posting at Sunday, 1 July 2012 Diakses tanggal 20 November 2014

³³ *Ibid.*,

pelanggaran hukum didahului dengan Laporan polisi, kemudian dilakukan **pemeriksaan oleh Penyidik Polisi dan dimajukan ke Makamah tingkat pertama** dengan hak banding 3 (tiga) kali. Sedangkan untuk pelanggaran disiplin didahului dengan laporan atasan dari anggota Polisi yang melanggar, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh bagian tata tertib dan dilakukan sidang yang langsung dipimpin oleh seorang berpangkat setingkat Komisaris Besar Polisi dengan anggota 3 (tiga) orang Polisi, keputusan sidang langsung dijalankan dengan hak pembelaan dari anggota Polisi yang di sidang atau **pembela (polisi atau umum)**.

Memahami terhadap penyelesaian atas pelanggaran hukum berupa pelanggaran kriminal atau tindak pidana dan pelanggaran kode etik, bagi personal Polisi Diraja Malaysia (PDRM) yang berlaku sekarang ini, adalah semua Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personil anggota Polisi Diraja Malaysia akan penyelesaiannya sama dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang biasa dengan mendasarkan pada ketentuan menurut **aturan hukum pidana umum**.

Penanganan dan penyelesaiannya atas pelanggaran hukum dilakukan oleh personal Polisi Diraja Malaysia (PDRM), yang ada hubungannya dengan dinas Polisi maupun pelanggaran hukum yang tidak ada hubungannya dengan dinas polisi adalah **tidak ada perbedaan**, kalau pelanggaran Polisi Diraja Malaysia (PDRM) menyangkut pidana baik dalam tugas maupun diluar tugas akan diadili di Makamah Umum. Seperti kasus penembakan terhadap pekerja Warga Negara Indonesia (WNI) beberapa waktu yang lalu, Makamah memutuskan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) tidak bersalah, karena sudah memenuhi prosedur sebelum menembak. Kemudian kasus pemerkosaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh 3 (tiga) Polisi Diraja Malaysia (PDRM) di Penang, saat ini sedang dalam proses sidang di Makamah Umum Penang.³⁴

Pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum kepada personal Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM), Diatur dalam **Akta Arahan Pentakbiran peguam awam**. Contoh kasus seperti di Penang dimana 3 (tiga) Polisi Diraja Malaysia (PDRM) sebagai tersangka menunjuk sendiri pembela/peguam. Fungsi bantuan hukum pada lembaga Polisi Diraja Malaysia (PDRM) bagi personil Polisi Diraja Malaysia adalah untuk bantuan hukum Polisi di Malaysia hanya berlaku untuk masalah pelanggaran tindakan disiplin pegawai polisi, karena kewenangan polisi di Malaysia dalam kasus pidana juga sebagai penuntut umum dalam sidang, bukan peguam/pembela.³⁵

³⁴ *Ibid.,*

³⁵ *Ibid.,*

Kedudukan divisi/lembaga bantuan hukum di Polisi Diraja Malaysia dalam memberikan perlindungan hukum, dalam prakteknya **tidak ada divisi khusus bantuan hukum dalam struktur Polisi Diraja Malaysia (PDRM)**, fungsi legal dalam PDRM ada pada bagian atau satuan kerja masing-masing seperti jawatan siasat jenayah narkotika dia memberikan masukan hukum dalam memperkuat penuntutan di sidang, atau ketika akan membuat MOU dengan pihak lain, maka fungsi legal berperan di Polisi Diraja Malaysia. Selanjutnya lebih tegasnya di Polisi Diraja Malaysia (PDRM) tidak ada secara struktural fungsi bantuan hukum.³⁶

4.2.4. Kepolisian Singapura

Ketentuan yang mengatur perlindungan dan bantuan hukum sebagai berikut :

*"All disciplinary actions against Police Officers from the Singapore Police Force; are guided by **the Police Force Act (PFA) – Section 40, 41 and 42. Section 40** of the Police Force Act spells out the types of punishments that a Commanding Officer may impose on the Police Officer, whom is found guilty of a disciplinary offence, after having given a reasonable opportunity to be heard in accordance to the Police Force Act and the Police Regulations".* (Terjemahan bebasnya : "Semua tindakan disipliner terhadap Polisi dari Kepolisian Singapura, dipandu oleh **UU Angkatan Kepolisian (PFA) – Pasal bagian 40, 41 dan 42. Bagian 40 dari UU Angkatan Kepolisian** merinci jenis hukuman bahwa Komandan mungkin memaksakan pada Petugas Kepolisian, yang ditemukan bersalah atas pelanggaran disiplin, setelah diberi kesempatan yang wajar untuk didengar sesuai dengan UU Kepolisian dan Peraturan Angkatan Polisi".)

*"The punishment imposed may be any of the following: a. Dismissal or compulsory retirement from the Police Force; b. Reduction in rank, grade or seniority; c. Deferment or stoppage of salary increment; d. Stoppage of leave; e. Restriction of privileges; f. Extra duty; g. Reprimand; h. Caution".*³⁷ (Terjemahan bebasnya : "Hukuman dijatuhkan mungkin salah satu dari berikut: a. Pemberhentian atau wajib pensiun dari Kepolisian; b. Penurunan pangkat, tingkat atau senioritas; c. Penundaan atau penghentian kenaikan gaji; d. Penghentian cuti; e. Pembatasan hak; f. Tugas tambahan; g. teguran; h. Peringatan".)

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ AG-C Singapore, *Police Force Act (CHAPTER 235)*, The following provisions in the Police Force Act (Act 24 of 2004), Revised Edition , (the Law Revision Commissioners , 2006), p.21

*"For Section 41 of the Police Force Act, Police Officer can also be prosecuted in Court for disciplinary offences instead of Police Disciplinary Board, when no penalty is expressly provided for in the Police Force Act, be liable to a fine or imprisonment or both".*³⁸ (Terjemahan bebasnya : **"Untuk Bagian 41 dari UU Angkatan Kepolisian**, Petugas Kepolisian juga dapat dituntut di pengadilan untuk pelanggaran disiplin bukan Dewan Disiplin Polisi, apabila tidak ada hukuman secara tegas diatur dalam UU Angkatan Kepolisian, dikenakan denda atau penjara atau keduanya".)

"However, any Police Officer who committed any criminal offences shall be tried in accordance to the existing criminal laws, just like any normal civilian who committed a crime. Police Officer convicted of an offence punishable with imprisonment, may be reduced in rank and dismissed from the Police Force by the Commissioner, where Section 42 of the Police Force Act applies". (Terjemahan bebasnya : "Namun, setiap Petugas Kepolisian yang melakukan suatu tindak pidana harus diadili sesuai dengan hukum pidana yang ada, sama seperti sipil biasa yang melakukan kejahatan. Petugas Kepolisian diputuskan melakukan pelanggaran yang diancam hukuman penjara, dapat dikurangi dalam pangkat dan dipecat dari Polisi oleh Komisaris, di mana **bagian 42 dari UU Angkatan Kepolisian** berlaku".)

*"For disciplinary offence, any officers in concerned may appeal against the findings or punishments from the disciplinary proceeding within 30 days to the Commissioner, where the punishment shall be suspended pending the determination of the appeal. The decision of the Commissioner on that appeal shall be final. There is no special legal protection or legal assistance provided to police personnel of Singapore where the officer has been accused committing a criminal offence. The officer shall provide his own legal assistance for the criminal proceeding".*³⁹ (Terjemahan bebasnya : "Untuk pelanggaran disiplin, setiap petugas yang bersangkutan dapat mengajukan banding terhadap temuan atau hukuman dari proses disipliner dalam waktu 30 hari kepada Komisaris, di mana hukuman harus ditangguhkan menunggu penentuan banding. Keputusan Komisaris di banding bersifat final. Tidak ada perlindungan hukum khusus atau bantuan hukum yang diberikan kepada personel polisi dari Singapura di mana petugas telah dituduh melakukan tindak pidana kejahatan. Petugas akan memberikan bantuan hukum sendiri untuk prosedur pidana".)

"For criminal case, the police officer shall receive the punishment as provided for under the criminal laws of Singapore just like any other civilian who committed the similar crime, ranging from given a fine to imprisonment or both or the capital punishment. For code of ethics cases, the officer may undergo disciplinary hearing under the Police Force Act".

³⁸ *Ibid.*, p.22

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ (Terjemahan bebasnya : “Untuk kasus pidana, polisi harus menerima hukuman sebagaimana ditetapkan dalam hukum pidana Singapura sama seperti sipil lainnya yang melakukan kejahatan serupa, mulai dari diberikan denda penjara atau keduanya atau hukuman mati. Untuk kode etik kasus, petugas dapat menjalani sidang disiplin di bawah UU Angkatan Kepolisian”).)

4.2.5. Kepolisian Indonesia

Ketentuan pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam PP RI No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI Pasal 13, yang menyatakan :

- Ayat (1) Tersangka atau terdakwa anggota POLRI berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan;
- Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas;
- Ayat (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan Penasihat Hukum dari institusi Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Penasihat Hukum lainnya.

Penegasan untuk pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI sudah diatur dalam PP RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak – Hak Anggota POLRI, Pasal 7 yang menyatakan :

- Ayat (1) **Setiap Anggota POLRI beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum** dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan;
- Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kapolri.

Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI perubahan atas PERKAP No. Pol. : 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Nasehat Hukum di Lingkungan POLRI, yang menyatakan :

⁴⁰ *Inid.,*

Pasal 1 :

- Angka 3 : **Bantuan Hukum** adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu penyelesaian permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan;
- Angka 4 : Pemohon adalah pegawai negeri pada Polri, dan keluarga besar Polri yang mengajukan permohonan bantuan hukum;
- Angka 5 : **Keluarga** adalah suami, isteri, orang tua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah;
- Angka 6 : Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada POLRI yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan POLRI untuk memberikan bantuan hukum.

Pasal 3 :

Ayat (1) Yang **berhak** mendapat Bantuan Hukum :

- a. Institusi POLRI;
- b. Satuan fungsi/satuan kerja;
- c. Pegawai Negeri pada POLRI dan;
- d. Keluarga Besar POLRI.

Ayat (2) **Keluarga Besar** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. Keluarga Pegawai Negeri pada POLRI;
- b. Purnawirawan POLRI;
- c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil POLRI;
- d. Warakawuri;
- e. Wredatama dan;
- f. Duda/janda dari anggota POLRI/Pegawai Negeri Sipil POLRI.

Selanjutnya dapat dibaca pada tabel 23 tentang Pengaturan Bantuan

Hukum pada Kepolisian di beberapa Negara di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 23 : Pengaturan Bantuan Hukum pada **Kepolisian di beberapa Negara**

	KEPOLISIAN	PERATURAN	SUBJEK HUKUM	JENIS		KEPENTINGAN	BANKUM
--	------------	-----------	--------------	-------	--	-------------	--------

NO.	NEGARA	YANG MENGATUR BANKUM	YANG MENPATKAN BANKUM	PERKARA YANG MENDA PATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	POLISI / KELUARGA POLISI	DARI POLISI /DI LUAR POLISI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KEPOLISIAN PHILIPPINA	- UU REPUBLIC NO. 8551. BAGIAN 56 - UU REPUBLIC NO.6975 BAGIAN 49	POLISI	TINDAK PIDANA & PELANG GARAN ETIKA POLISI	BERHAK	KEPENTINGAN POLISI	DARI DINAS POLISI
2.	KEPOLISIAN THAILAND	- HUKUM PIDANA & HUKUM ACARA PIDANA. - PERATURAN POLISI, BAB 2, Pasal 3	POLISI	TINDAK PIDANA & PELANG GARAN ETIKA POLISI	BERHAK	KEPENTINGAN POLISI	DARI DINAS POLISI
3.	KEPOLISIAN MALAYSIA	- HUKUM PIDANA AKTA 593 KANUN PROSEDUR JENAYAH. - AKTA ARAHAN PENTAKBIRA N PEGUAM AWAM. - AKTA POLISI 1967 (AKTA 344)	POLISI	PELANG GARAN TINDAK AN DISIPLIN & PELANG GARAN KODE ETIK	BERHAK	KEPENTINGAN POLISI	DARI DINAS POLISI
4.	KEPOLISIAN SINGAPURA	- UU ANGKATAN POLISI BAGIAN 40, 41, 42	POLISI	PELANG GARAN TINDAK AN DISIPLIN & PELANG GARAN KODE ETIK	BERHAK	KEPENTINGAN POLISI	DARI DINAS POLISI
5.	KEPOLISIAN INDONESIA	- PP RI NO. 3 TAHUN 2003 - PP RI NO. 42 TAHUN 2010 - PERATURAN KAPOLRI NO. 2 TAHUN 2017	POLISI DAN KELUARGA POLISI	PELANGG ARAN TINDAK PIDANA, GUGATAN PERDATA, GUGATAN DI PENGADIL AN AGAMA, PELANGG ARAN DISIPLIN DAN	BERHAK	KEPENTINGAN POLISI DAN KEPENTINGAN PRIBADI/INDI VIDU	DARI DINAS POLISI ATAU DARI LUAR POLISI

				KODE ETIK			
--	--	--	--	--------------	--	--	--

Sumber : bahan hukum primer diolah

Berdasarkan Tabel 23 tersebut di atas menunjukkan tentang pengaturan bantuan hukum bagi Anggota Kepolisian dan keluarganya di beberapa Negara yang meliputi Kepolisian Philipina, Kepolisian Thailand, Kepolisian Malaysia, dan Kepolisian Singapura, bagi anggota Kepolisian berhak mendapatkan bantuan hukum dari Dinas Kepolisian. Bantuan Hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan kepolisian, hanya terdapat perbedaan pada peraturan yang mengatur dan jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum, di mana di Kepolisian Philipina (diatur dalam Bagian 56 UU Republic No. 8551. Bagian 49 UU Republic No.6975) dan Kepolisian Thailand (diatur dalam BAB 2, Pasal Kode Pidana dan Hukum Acara Pidana Peraturan Polisi, 3) jenis jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum terhadap Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik, sementara di Kepolisian Malaysia (diatur di dalam Akta 593 Kanun Prosedur Jenayah; Akta Arahan Pentakbiran Peguam Awam. Akta Polisi 1967 /Akta 344) dan Kepolisian Singapura (daur di dalam Uu Angkatan Polisi Bagian 40, 41, 42) jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum terhadap Pelanggaran Tindakan Disiplin dan Pelanggaran Kode Etik. Khusus Kepolisian Indonesia (POLRI) pemberian bantuan hukum tidak di atur dalam Undang – Undang POLRI, namun di atur dalam PP RI dan Peraturan Kapolri untuk pemberian bantuan hukum kepada Anggota POLRI dan keluarga POLRI.

4.3. Pengaturan Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

4.3.1. Pengaturan Bantuan Hukum yang Berlaku Umum

4.3.1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia

No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdiri dari :

Pasal 54 yang substansinya "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa **berhak** mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada **setiap tingkat pemeriksaan**, menurut tatacara yang ditentukan dalam UU ini";⁴¹

Pasal 55 menyatakan "Untuk mendapatkan Penasihat Hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa **berhak** memilih sendiri Penasihat Hukumnya";⁴²

Pasal 56

ayat (1) "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib** menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka";

ayat (2) "Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan **cuma-Cuma**"⁴³; dan

Pasal 69 "Penasihat Hukum **berhak** menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam UU ini".⁴⁴

Berkaitan dengan tujuan diatur dalam Pasal 54 yakni Guna kepentingan pembelaan, bagi tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Subjek hukum yang mendapatkan bankum adalah

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, hlm. 16

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.17

setiap orang, selanjutnya jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan yakni perkara pidana, adapun sifat mendapatkan bantuan hukum adalah berhak.

Berpijak pada tabel : 24 di bawah ini, dapat dilihat perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

Tabel 24 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	DENIS PERKARA YANG MENDAPAT BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6	7
1. 2.	<p>Pasal 55 "Untuk mendapatkan Penasihat Hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya".</p> <p>Pasal 56 ayat (1) "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka";</p> <p>ayat (2) "Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-Cuma".</p> <p>Pasal 69 "Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam UU ini".</p>	Setiap orang	Perkara pidana	Berhak dan wajib	<p>Pasal 54 "Guna kepentingan pembelaan", tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam UU ini".</p>	<p>Pasal 55 "Untuk mendapatkan Penasihat Hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya".</p> <p>Pasal 56 ayat (1) "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang</p>

						bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka"; ayat (2) "Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma ".
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : bahan hukum primer diolah

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 24 tersebut, diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69. Ketentuan tersebut berisi kebijakan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang disangkaa atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri. Artinya pemberian bantuan hukum berlaku bagi siapapun yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut. Ketentuan tersebut diatur dengan tujuan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang

atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan dalam proses penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana.

4.3.1.2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari :

Pasal 5 ayat (2) "Setiap orang berhak mendapat **bantuan dan perlindungan** yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak"; ⁴⁵dan

Pasal 8 "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah"; ⁴⁶ selanjutnya dalam **penjelasan Pasal 8** "Yang dimaksud dengan **Perlindungan** adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia";

Pasal 18 ayat (4) "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan **bantuan hukum** sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"; ⁴⁷

Berhubungan dengan tujuan adalah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 beserta penjelasannya yakni untuk mendapatkan **bantuan dan perlindungan** yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak, serta pembelaan HAM. Subjek hukum yang mendapatkan bankum adalah setiap orang, jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan yakni perkara HAM, adapun sifat mendapatkan bantuan hukum adalah berhak.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), hlm. 3

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.6

Berdasarkan pada tabel : 25 di bawah ini, dapat diketahui perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Tabel 25 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang **Hak Asasi Manusia (HAM)**

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 18 ayat (4) "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".	Setiap orang	Perkara HAM	Berhak	<p>1. Pasal 5 ayat (2) "Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak";</p> <p>1. Pasal 8 "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah"; selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 "Yang dimaksud dengan Perlindungan adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia".</p>	-

Sumber : bahan hukum primer diolah

Dalam Tabel 25 tersebut di atas, dijelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dalam arti bantuan hukum ini diberikan

dalam proses peradilan pidana, dengan maksud agar Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Di sini penekanannya pada pelaksanaan Peradilan Pidana yang berorientasi terpenuhinya hak atas perlindungan secara adil, obyektif dan tidak memihak.

4.3.1.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang **Advokat** terdiri dari :

Pasal 1 angka 1 "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini";⁴⁸

Angka 2 "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien";⁴⁹

Pasal 3 ayat (1) huruf c "Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : **tidak berstatus sebagai pegawai negeri** atau pejabat negara";⁵⁰

Pasal 22 ayat (1) "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu";⁵¹ dan

Pasal 32 ayat (1) "Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, hlm.

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.3

⁵¹ *Ibid.*, hlm.6

mulai berlaku, dinyatakan sebagai **Advokat** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini⁵².

Dari tabel : 26 di bawah ini, dapat dijelaskan perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang **Advokat** sebagai berikut :

⁵² *Ibid.*, hlm.8

Tabel 26 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang **Advokat**

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 angka 1 "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini".	Setiap orang	perkara (pidana, perdata, PTUN dan HAM)	Berhak	Pasal 1 Angka 2 "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien";	Pasal 22 ayat (1) "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu";
2.	Pasal 3 ayat (1) huruf c "Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara".					
3.	Pasal 22 ayat (1) "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu";					
4.	Pasal 32 ayat (1) "Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".					

Sumber : bahan hukum primer diolah

Uraian tersebut di atas dan paparan Tabel 26 tersebut, menjelaskan bahwa Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, diatur di dalam Pasal 1 angka 1, angka 2 dan Pasal 22 ayat (1). Pada Pasal 1 angka 1, angka 2 menjelaskan pengertian dari Advokat dan persyaratan untuk menjadi Advokat, di mana Advokat sebagai

orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, kemudian secara limitative pada Pasal 22 ayat (1) ditegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

4.3.1.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terdiri dari :

Pasal 56 ayat (1) “Setiap yang tersangkut perkara **berhak** memperoleh bantuan hukum”; dan **Penjelasan Pasal 56 ayat (1)** “Yang dimaksud dengan **Bantuan Hukum** adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu)”;⁵³

Pasal 57 ayat (2) “Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara **Cuma-Cuma** pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut, telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁵⁴

Berkaitan dengan tujuan adalah diatur dalam **Penjelasan Pasal 56 ayat (1)** untuk pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili,

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 12

⁵⁴ *Ibid.*,

mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu). Subjek hukum yang mendapatkan bankum adalah setiap orang, adapun sifat mendapatkan bantuan hukum adalah berhak.

Berpedoman pada tabel : 27 di bawah ini, dapat dipahami perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :

Tabel 27 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang **Kekuasaan Kehakiman**

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1. 2.	<p>Pasal 56 ayat (1) "Setiap yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum";</p> <p>Pasal 57 ayat (2) "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma-Cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut, telah memperoleh kekuatan hukum tetap".</p>	Setiap orang	-	berhak	<p>Penjelasan Pasal 56 ayat (1) "Yang dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu).</p>	<p>Pasal 57 ayat (2) "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara Cuma-Cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut, telah memperoleh kekuatan hukum tetap".</p>

Sumber : bahan hukum primer diolah

Dalam Tabel 27 tersebut di atas menjelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat

(2), hal ini menegaskan bahwa pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu). Jadi ketentuan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dilakukan apabila terdapat seseorang pencari keadilan yang tidak mampu, maka pengadilan wajib menyiapkan Penasihat Hukum/Advokat untuk memberikan bantuan hukum terhadapnya.

4.3.1.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terdiri dari :

Pasal 1 angka (1) "Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin";

Angka (2) "Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU ini"; ⁵⁵

Pasal 3 "Penyelenggaraan Bantuan hukum bertujuan untuk :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara RI;
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan. ⁵⁶

Pasal 4 ayat (1) "Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum";

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, hlm. 2

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 3

ayat (2) "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan PTUN baik **litigasi** maupun **nonlitigasi**";⁵⁷ dan

Pasal 16 ayat (1) "Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan UU ini dibebankan kepada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**".⁵⁸

Berdasarkan pada tabel : 28 di bawah ini, dapat diketahui perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sebagai berikut :

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 6

Tabel 28 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia
No. 16 Tahun 2011 Tentang **Bantuan Hukum**

NO. URUT	PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPAT KAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPAT KAN BANKUM	HAK ATAS BANK UM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 angka (1) "Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin; Angka (2) "Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU ini.	Setiap orang dan/atau kelompok orang miskin	Pasal 4 ayat (2) "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana dan PTUN baik litigasi maupun nonlitigasi .	berhak	Pasal 3 "Penyelenggaraan Bantuan hukum bertujuan untuk : a.Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; b.Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; c.Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara RI; d.Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.	-
2.	Pasal 4 ayat (1) "Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;					
3.	Pasal 16 ayat (1) "Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan UU ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .					

Sumber : bahan hukum primer diolah

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 28 tersebut di atas, menegaskan bahwa undang-undang ini memang mengatur tujuan pemberian bantuan hukum, Berpedoman dengan tujuan diatur dalam Pasal 3 adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak

konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara RI; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan. Subjek hukum yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang, jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan pada jenis perkara (Pidana, Perdata, PTUN dan HAM), adapun sifat mendapatkan bantuan hukum adalah berhak. sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yang berlaku bagi setiap orang dan/atau kelompok orang miskin.

4.3.1.6. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Hukum Acara Pidana

Pengaturan Bantuan Hukum pada **Rancangan Undang-Undang** Republik Indonesia No. ... Tahun ... Tentang **Hukum Acara Pidana** terdiri dari

Pasal 89 ayat (1) "Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa **berhak:**

a. **menunjuk Penasihat Hukumnya** dan memberikan identitas mengenai dirinya; c.diberitahu tentang haknya";

Pasal 92 "Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa **berhak** mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam UU ini";

Pasal 93 ayat (1) "Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan **wajib** menunjuk seseorang sebagai Penasihat Hukum untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa **yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih** dan tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri";

Ayat (2) "Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma"; dan

Pasal 103 "Penasihat Hukum berhak mendampingi **tersangka atau terdakwa** sejak saat tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam UU ini".

Berpijak pada tabel : 29 di bawah ini, dapat dilihat perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada **Rancangan Undang-Undang** Republik Indonesia No. ... Tahun ... Tentang **Hukum Acara Pidana** sebagai berikut :

Tabel 29 : Pengaturan Bantuan Hukum pada **Rancangan Undang-Undang** Republik Indonesia No. ... Tahun ... Tentang **Hukum Acara Pidana**

NO. URUT	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM	HAK ATAS BANTUAN HUKUM	TUJUAN BANTUAN HUKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rancangan UU	Setiap orang	perkara pidana	berhak dan wajib	Pasal 92 "Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam UU ini".	Pasal 89 ayat (1) "Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak: a. menunjuk Penasihat Hukumnya dan memberikan identitas mengenai dirinya; c.diberitahu tentang haknya".
2.	Pasal 89 ayat (1) "Dalam rangka pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak: a. menunjuk Penasihat Hukumnya dan memberikan identitas mengenai dirinya; c.diberitahu tentang haknya". Pasal 93 ayat (1) "Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang sebagai penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri"; Ayat (2) "Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma".					Pasal 93 ayat (1) "Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang sebagai penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri"; Ayat (2) "Penasihat Hukum sebagaimana
3.	Pasal 103 "Penasihat Hukum berhak mendampingi tersangka atau terdakwa sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam UU ini".					

						dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma”.
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : bahan hukum **Sekunder** diolah

Tabel 29 tersebut di atas menjelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No. ... Tahun ... Tentang Hukum Acara Pidana, berhubungan dengan tujuan diatur dalam Pasal 92 adalah untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Subjek hukum yang mendapatkan bankum adalah setiap orang, jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan yakni perkara Pidana, adapun sifat mendapatkan bantuan hukum adalah berhak.

Selanjutnya Pasal 69 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 103. Ketentuan tersebut nampaknya tidak terlalu berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, didalamnya sama-sama berisi kebijakan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri. Artinya pemberian bantuan hukum berlaku bagi siapapun yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No. ... Tahun ... Tentang Hukum Acara Pidana tersebut. Ketentuan tersebut diatur dengan tujuan guna

kepentingan pembelaan , tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan dalam proses penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana.

4.3.2. Pengaturan Bantuan Hukum yang Berlaku Khusus

4.3.2.1. Di Lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI)

4.3.2.1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari :

Pasal 50 ayat (2) "Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi : huruf (f) **bantuan hukum**"; dan **Ayat (3)** "Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi huruf (c) **bantuan hukum**"⁵⁹

Bantuan hukum bagi Anggota TNI tersebut dipaparkan dalam tabel : 30 di bawah ini, dapat dilihat perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai berikut :

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)., hlm. 6

Tabel 30 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang **Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

NO. URUT	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 50 ayat (2) "Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi : huruf (f) bantuan hukum; Ayat (3) "Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi huruf (c) bantuan hukum;	Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit adalah (istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan)	Semua jenis perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata)	berhak	-	-

Sumber : bahan hukum primer diolah

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 30 tersebut di atas, menjelaskan bahwa ketentuan bantuan hukum diatur dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf c.

4.3.2.1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010 Tentang **Administrasi Prajurit TNI** terdiri dari :

Pasal 1 angka 28 "Rawatan Kedinasan adalah segala pemberian dalam bentuk materiil dan non materiil oleh negara guna memenuhi kebutuhan insani baik jasmani maupun rohani meliputi penghasilan prajurit, **rawatan prajurit, rawatan keluarga prajurit** dan anugerah";⁶⁰

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI

Pasal 41 ayat (1) huruf j "Prajurit mendapat rawatan prajurit berupa: **bantuan hukum**";⁶¹ dan

Pasal 44 ayat (1) huruf d "Keluarga Prajurit mendapat rawatan keluarga Prajurit meliputi: **bantuan hukum**".⁶²

Bantuan hukum diberikan kepada Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit adalah (istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan), pada semua jenis perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata).

Beberapa ketentuan tersebut menegaskan bagi Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit baik istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan, apabila terlibat suatu perkara berhak memperoleh bantuan hukum atas perkara yang dihadapinya tersebut, jadi pemberian bantuan hukum merupakan hak bagi Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan (berhak).

Berdasarkan pada tabel : 31 di bawah ini, dapat dipahami perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010 Tentang **Administrasi Prajurit TNI** sebagai berikut :

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 7

⁶² *Ibid.*,

Tabel 31 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010 Tentang **Administrasi Prajurit TNI**

NO. URUT	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 angka 28 "Rawatan Kedinasan adalah segala pemberian dalam bentuk materiil dan non materiil oleh negara guna memenuhi kebutuhan insani baik jasmani maupun rohani meliputi penghasilan prajurit, rawatan prajurit, rawatan keluarga prajurit dan anugerah;	Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit adalah (isteri/suami dan anak yang menjadi tanggungan)	Semua jenis perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata)	berhak	-	-
2.	Pasal 41 ayat (1) huruf j "Prajurit mendapat rawatan prajurit berupa: bantuan hukum ";					
3.	Pasal 44 ayat (1) huruf d "Keluarga Prajurit mendapat rawatan keluarga Prajurit meliputi: bantuan hukum ";					

Sumber : bahan hukum primer diolah

Tabel 31 tersebut di atas menjelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI, diatur pada Pasal 1 angka 28, Pasal 41 ayat (1) huruf j, dan Pasal 44 ayat (1) huruf d.

Ketentuan ini juga merupakan kebijakan yang berlaku khusus bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), sehingga Bantuan hukum yang diberikan berlaku khusus hanya kepada Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit

adalah (istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan), pada semua jenis perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata).

Beberapa ketentuan tersebut menegaskan bagi Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit baik istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan, apabila terlibat suatu perkara berhak memperoleh bantuan hukum atas perkara yang dihadapinya tersebut, jadi pemberian bantuan hukum merupakan hak bagi Anggota TNI, Prajurit siswa, dan Keluarga prajurit istri/suami dan anak yang menjadi tanggungan.

4.3.2.1.3. Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor. SKEP/168/III/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di lingkungan Departemen Pertahanan

Pengaturan Bantuan Hukum pada Surat Keputusan No : SKEP/168/III/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan terdiri dari :

Bagian A angka 5 huruf a "Pelayanan Hukum meliputi bantuan hukum dan nasehat hukum";⁶³

Bagian A angka 5 huruf b "Bantuan Hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain kepada Pimpinan, Satuan Organisasi, anggota TNI/PNS Departemen Pertahanan beserta keluarganya serta purnawirawan/warakawuri dan pensiunan PNS yang dilakukan di sidang Pengadilan";⁶⁴

⁶³ Surat Keputusan No : SKEP/168/III/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan

⁶⁴ *Ibid.*,

Bagian A angka 5 huruf c "Nasehat Hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain kepada Pimpinan, Satuan Organisasi, anggota TNI/PNS Departemen Pertahanan beserta keluarganya serta purnawirawan/warakawuri dan pensiunan PNS yang dilakukan di luar Pengadilan";⁶⁵

Bagian B angka 6 "Pihak yang **berhak memperoleh pelayanan hukum** (pimpinan, satuan organisasi, Anggota TNI dan PNS beserta Keluarganya, serta purnawirawan/warakawuri dan pensiunan PNS) berhak memperoleh pelayanan hukum baik bersifat kedinasan maupun yang bersifat pribadi";⁶⁶

Bagian C angka 8 "Jenis pelayanan hukum meliputi perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata yang berkaitan dengan Nikah, Cerai, Talak, Rujuk dan Warisan menurut Hukum Islam)";⁶⁷

Bagian C angka 9 "Bentuk bantuan hukum berupa pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa , mewakili , mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain di sidang Pengadilan".⁶⁸

Berpijak pada tabel : 32 di bawah ini, dapat diketahui perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Surat Keputusan No : SKEP/168/III/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan sebagai berikut :

⁶⁵ *Ibid.,*

⁶⁶ *Ibid.,*

⁶⁷ *Ibid.,*

⁶⁸ *Ibid.,*

Tabel 32 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Surat Keputusan No :
SKEP/168/III/2004 Tentang **Pedoman Pelaksanaan Pelayanan
Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan**

NO. URU T	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATK AN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bagian A angka 5 huruf a "Pelayanan Hukum meliputi bantuan hukum dan nasehat hukum";	Bagian B angka 6 "Pihak yang berhak memperoleh pelayanan hukum (pimpinan, satuan organisasi, Anggota TNI dan PNS beserta keluarganya, serta purnawirawan/w arakawuri dan pensiunan PNS) berhak memperoleh pelayanan hukum baik bersifat kedinasan maupun yang bersifat pribadi	Bagian C angka 8 "Jenis pelayanan hukum meliputi perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata yang berkaitan dengan Nikah, Cerai, Talak, Rujuk dan Warisan menurut Hukum Islam)	berhak	Bagian A angka 2 "Pelayanan hukum adalah untuk terlaksananya proses pelaksanaan pelayanan hukum secara tertib dan lancar, sehingga dapat terwujudnya pelaksanaan pelayanan hukum yang optimal".	-
2.	Bagian A angka 5 huruf b "Bantuan Hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain kepada Pimpinan, Satuan Organisasi, anggota TNI/PNS Departemen Pertahanan beserta keluarganya serta purnawirawan/warakawuri dan pensiunan PNS yang dilakukan di sidang Pengadilan ";					
3.	Bagian A angka 5 huruf c "Nasehat Hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain kepada Pimpinan, Satuan Organisasi, anggota TNI/PNS Departemen Pertahanan beserta keluarganya serta purnawirawan/warakawuri dan pensiunan PNS yang dilakukan di luar Pengadilan ";					
	Bagian C angka 9 "Bentuk bantuan hukum berupa pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain di sidang Pengadilan"					

Sumber : bahan hukum primer diolah

Dalam Tabel 32 tersebut di atas menjelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada Surat Keputusan No : SKEP/168/III/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan, yang diatur pada Bagian A angka 5 huruf , huruf b, huruf c, Bagian B angka 6, Bagian C angka 8, dan angka 9.

Ketentuan ini juga merupakan kebijakan yang berlaku khusus bagi Personil Hukum di Lingkungan Departemen Pertahanan, sehingga Bantuan hukum yang diberikan berlaku khusus hanya kepada pimpinan, satuan organisasi, Anggota TNI dan PNS beserta Keluarganya, serta purnawirawan/warakawuri dan pensiunan PNS), semua jenis perkara (pidana, perdata, PTUN, PTU MILITER, Perdata yang berkaitan dengan Nikah, Cerai, Talak, Rujuk dan Warisan menurut Hukum Islam).

4.3.2.1.4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 1971

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1971 tertanggal 10 Februari 1971, Perihal : "Pegawai Negeri/Anggota ABRI yang melakukan pekerjaan sebagai Pembela/Penasihat Hukum di muka pengadilan". Menegaskan bahwa sebenarnya Pegawai Negeri/Anggota ABRI yang melakukan pekerjaan sebagai Pembela/Penasihat Hukum di muka pengadilan umum harus ditolak, karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1952 tentang Larangan Pegawai Negeri untuk Melakukan Pekerjaan dalam Lapangan Pertikelir, dan Surat Instruksi Direktur Kehakiman Angkatan Darat No. ST-D 112/1969 tentang Larangan Bagi Anggota Militer di Lingkungan Kehakiman Angkatan Darat untuk bertindak sebagai Pembela/Penasihat Hukum di Muka Pengadilan. Namun demikian, terdapat pengecualian dan dapat diberikan untuk menjadi

Pembela/Penasihat Hukum bilamana telah mendapatkan izin khusus dari pembesar/atasannya dan sungguh sungguh telah memenuhi syarat.⁶⁹

Pelaksanaan bantuan hukum bagi anggota prajurit TNI dan keluarga prajurit TNI, salah satunya juga digunakan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, mengingat sampai dengan sekarang ini, belum ada pencabutan atas berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1971 tanggal 10 Februari 1971, apalagi dalam praktek persidangan sangat mendukung sebagai kelengkapan administratif bantuan hukum.

4.3.2.2. Di lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

4.3.2.2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI terdiri dari :

Pasal 15 ayat (1) "Dalam menyelenggarakan tugas dalam Pasal 13, dan 14 Polri secara umum berwenang : **e.** Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian".⁷⁰

Pasal 20 ayat (1) "Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil".

Ayat (2) "Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian".⁷¹

⁶⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1971 tertanggal 10 Februari 1971, Perihal : "Pegawai Negeri/Anggota ABRI yang melakukan pekerjaan sebagai Pembela/Penasihat Hukum di muka pengadilan"

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.,

Pasal 26 ayat (1) "Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak ".

Ayat (2) "Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".⁷²

Pasal 29 ayat (1) "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan **peradilan umum**".

Ayat (2) "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP)".⁷³

Berdasarkan pada tabel : 33 di bawah ini, dapat dilihat perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI sebagai berikut :

⁷¹ *Ibid.,*

⁷² *Ibid.,*

⁷³ *Ibid.,*

Tabel 33 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang **Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)**

NO. URUT	KETENTUNGAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 15 ayat (1) "Dalam menyelenggarakan tugas dalam Pasal 13, dan 14 Polri secara umum berwenang: e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian";	-	-	-	-	-
2.	Pasal 20 ayat (1) "Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas : a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Pegawai Negeri Sipil". Ayat (2) "Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian".					
3.	Pasal 26 ayat (1) "Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak. Ayat (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.					
4.	Pasal 29 ayat (1) "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum "; Ayat (2) "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP).					

Sumber : bahan hukum primer diolah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI **belum mengatur norma bantuan hukum** bagi Anggota POLRI dan keluarganya, namun terkait dengan pelanggaran disiplin bagi Anggota POLRI telah diatur pada tingkatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada Tabel 33 tersebut di atas menjelaskan belum mengatur pemberian Bantuan Hukum pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI, baik dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 29 ayat (1), ayat (2) hanya menegaskan bahwa Anggota POLRI tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum. Namun demikian, secara khusus terkait dengan hak-hak Anggota POLRI dan keluarganya secara khusus diatur dalam suatu Peraturan pemerintah, sehingga bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI terkait dengan hak-hak tersebut, termasuk hak memperoleh bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI telah mengatur bantuan hukum diberikan kepada Anggota POLRI, jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan dan jenis perkara (Pidana, Perdata, gugatan di Pengadilan Agama, PTUN dan HAM).

4.3.2.2.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota POLRI

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI terdiri dari :

Pasal 2 "Proses peradilan pidana bagi Anggota POLRI secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku **di lingkungan peradilan umum**";⁷⁴

Pasal 13 ayat (1) "Tersangka atau Terdakwa Anggota POLRI **berhak mendapatkan bantuan hukum** pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan";

Ayat (2) "POLRI **wajib** menyediakan tenaga **bantuan hukum** bagi tersangka atau terdakwa Anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan **kepentingan tugas**"

Ayat (3) "**Bantuan hukum** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan **Penasihat Hukum dari Institusi POLRI** dan atau Penasihat Hukum lainnya".⁷⁵

Berkaitan pada tabel : 34 di bawah ini, dapat dijelaskan perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI sebagai berikut :

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia.,

⁷⁵ *Ibid.*,

Tabel 34 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang **Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI**

NO. URUT	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6	7
1. 2.	<p>Pasal 2 "Proses peradilan pidana bagi Anggota POLRI secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum";</p> <p>Pasal 13 ayat (1) "Tersangka atau Terdakwa Anggota POLRI berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan";</p> <p>Ayat (2) "POLRI wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa Anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas";</p> <p>Ayat (3) "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan Penasihat Hukum dari Institusi POLRI dan atau Penasihat Hukum lainnya".</p>	Anggota POLRI dan PNS di lingkungan POLRI	Jenis perkara pidana.	<p>Pasal 13 Ayat (2) "POLRI wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa Anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas";</p>	-	<p>Pasal 13 ayat (1) "Tersangka atau Terdakwa Anggota POLRI berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan";</p> <p>Ayat (3) "Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan Penasihat Hukum dari Institusi POLRI dan atau Penasihat Hukum lainnya".</p>

Sumber : bahan hukum primer diolah

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota POLRI, sebagaimana dipaparkan pada Tabel 34, diatur dalam Pasal 2, Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan ini

menegaskan bahwa “Tersangka atau Terdakwa Anggota POLRI berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan”; dan Institusi “POLRI **wajib** menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa Anggota POLRI yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas, dengan memanfaatkan Penasihat Hukum dari Institusi POLRI dan atau Penasihat Hukum lainnya”.

Ketentuan ini bersifat khusus yang mengatur bantuan hukum diberikan hanya kepada Anggota dan PNS di lingkungan POLRI, jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan dan jenis perkara (Pidana).

4.3.2.2.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI terdiri dari :

Pasal 1 angka 1 “Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”; **Angka 3** “Hak Anggota POLRI adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap Anggota POLRI karena tugas dan jabatannya”;⁷⁶

Pasal 5 huruf b “Hak-hak lainnya Anggota POLRI meliputi: **bantuan hukum** dan perlindungan keamanan”;⁷⁷

Pasal 7 ayat (1) “Setiap **Anggota POLRI beserta keluarganya** berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan”; **Ayat (3)** “Ketentuan lebih lanjut mengenai

⁷⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Republik Indonesia.,

⁷⁷ *Ibid.*,

pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan **Peraturan Kapolri**".⁷⁸

Berpedoman pada tabel : 35 di bawah ini, dapat dipahami perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI sebagai berikut :

⁷⁸ *Ibid.,*

Tabel 35 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang **Hak-Hak Anggota POLRI**

NO. URUT	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 angka 1 "Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia";	Anggota POLRI dan PNS di lingkungan POLRI, serta keluarganya.	Jenis perkara (pidana, perdata, gugatan di Pengadilan Agama, PTUN dan HAM)	Pasal 7 : ayat (1) "Setiap Anggota POLRI beserta keluarganya a berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan";	-	Pasal 7 : ayat (1) "Setiap Anggota POLRI beserta keluarganya a berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan";
2.	Pasal 5 huruf b "Hak-hak lainnya Anggota POLRI meliputi: bantuan hukum dan perlindungan keamanan".					
3.	Pasal 7 ayat (1) "Setiap Anggota POLRI beserta keluarganya berhak memperoleh bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan"; Ayat (3) "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) Diatur dengan Peraturan Kapolri ".					

Sumber : bahan hukum primer diolah

Pada Tabel 35 tersebut di atas menjelaskan tentang Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1, angka 3, Pasal 5 huruf b, Pasal 7 ayat (1), ayat (3). Hak-hak Polri yang diatur dalam ketentuan ini merupakan hak Anggota POLRI yang dapat diberikan oleh Negara karena tugas dan jabatannya, sementara hak lainnya meliputi hak atas bantuan hukum dan perlindungan keamanan, yang dapat diperoleh bagi setiap

anggota POLRI beserta keluarganya **berhak** mendapatkan bantuan hukum dari dinas baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

Secara teknis pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya diatur dalam Peraturan Kapolri. Bantuan hukum diberikan kepada Anggota POLRI dan keluarganya tersebut berlaku khusus dengan jenis perkara yang mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkatan dan jenis perkara (Pidana, Perdata, gugatan di Pengadilan Agama, PTUN dan HAM).

4.3.2.2.4. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI

Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI terdiri dari :

Pasal 1 angka 3 "Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya , kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan";⁷⁹

Angka 5 "Keluarga adalah suami, istri, orang tua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah".⁸⁰

Angka 6 "Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada POLRI yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan POLRI untuk memberikan bantuan hukum".⁸¹

Pasal 2 "Pemberian Bantuan Hukum oleh POLRI, meliputi :

- a. konsultasi hukum;
- b. nasihat hukum;

⁷⁹ Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI.

⁸⁰ *Ibid.,*

⁸¹ *Ibid.,*

- c. saran dan pendapat hukum;
- d. advokasi; dan
- e. pendamping".⁸²

Pasal 3 ayat (1) "Yang berhak mendapat Bantuan Hukum :

- a. institusi POLRI;
- b. satuan fungsi/satuan kerja;
- c. pegawai negeri pada POLRI; dan
- d. keluarga besar POLRI".

Ayat (2) "Keluarga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d, meliputi :

- a. keluarga pegawai negeri pada POLRI;
- b. purnawirawan POLRI;
- c. pensiunan Pegawai Negeri Sipil POLRI;
- d. warakawuri;
- e. wredatama;
- f. duda/janda dari Anggota POLRI/Pegawai Negeri Sipil POLRI".⁸³

Pasal 8 ayat (1) "Penasihat Hukum/Kuasa Hukum melaksanakan Bantuan

Hukum pada :

- a. tingkat penyidikan;
- b. tingkat penuntutan; dan/atau
- c. semua tingkat peradilan".⁸⁴

Pasal 9 ayat (1) "Penasihat Hukum melaksanakan Bantuan Hukum mulai dari

tingkat pemeriksaan sampai pada sidang Disiplin atau sidang Komisi

Kode Etik POLRI";⁸⁵

Pasal 12 "Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara **Perdata**";⁸⁶

Pasal 13 "Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara **Pidana**";⁸⁷

Pasal 14 "Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara **Praperadilan**"⁸⁸

⁸² *Ibid.,*

⁸³ *Ibid.,*

⁸⁴ *Ibid.,*

⁸⁵ *Ibid.,*

⁸⁶ *Ibid.,*

⁸⁷ *Ibid.,*

⁸⁸ *Ibid.,*

Pasal 15 "Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara **di Pengadilan Agama** bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam";⁸⁹

Pasal 16 "Pemberian Bantuan Hukum atas penyelesaian perkara **Tata Usaha Negara**";⁹⁰

Pasal 17 "Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara **Hak Asasi Manusia**";⁹¹

Pasal 18 "Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara **Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik**";⁹²

Pasal 21 "Administrasi yang harus dilengkapi dalam pemberian Bantuan Hukum, meliputi

- a. surat perintah;
- b. surat kuasa khusus; dan
- c. surat permohonan izin insidentil/izin substitusi/**izin khusus**";⁹³

Pasal 22 "Semua biaya kegiatan Bantuan Hukum untuk kepentingan institusi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran POLRI sesuai indeks yang berlaku".⁹⁴

Pasal 23 ayat (3) "Pelaksanaan **pengawasan dan pengendalian** dilaksanakan dengan cara :

- a. supervisi;
- b. asistensi; dan/atau
- c. monitoring secara berjenjang".⁹⁵

Berpedoman pada tabel : 36 di bawah ini, dapat dipahami perihal Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

⁸⁹ *Ibid.,*

⁹⁰ *Ibid.,*

⁹¹ *Ibid.,*

⁹² *Ibid.,*

⁹³ *Ibid.,*

⁹⁴ *Ibid.,*

⁹⁵ *Ibid.,*

Indonesia (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI sebagai berikut :

Tabel 36 : Pengaturan Bantuan Hukum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang **Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI**

NO. URUT	KETENTUAN PASAL YANG MENGATUR BANTUAN HUKUM	SUBJEK HUKUM YANG MENDAPATKAN BANKUM	JENIS PERKARA YANG MENDAPATKAN BANKUM	HAK ATAS BANKUM	TUJUAN BANKUM	MACAM BANTUAN HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 1 angka 3 "Bantuan Hukum" adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan".</p> <p>Angka 5 "Keluarga" adalah suami, istri, orang tua kandung, mertua, anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah".</p> <p>Angka 6 "Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping" adalah Pegawai Negeri pada POLRI yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan POLRI untuk memberikan bantuan hukum"</p>	<p>Pasal 3</p> <p>ayat (1) "Yang berhak mendapat Bantuan Hukum : a. institusi POLRI; b. satuan fungsi/satuan kerja; c. pegawai negeri pada POLRI; dan d. keluarga besar POLRI".</p> <p>Ayat (2) "Keluarga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. keluar pegawai negeri pada POLRI; b. purnawirawan POLRI; c. pensiunan Pegawai Negeri Sipil POLRI; d. warakawuri; e. wredatama; f. duda/janda dari Anggota POLRI/Pegawai Negeri Sipil POLRI"</p>	Jenis perkara (pidana, perdata, PTUN, praperadilan, Pengadilan Agama, HAM, pelanggaran Disiplin, dan Kode Etik).	Berhak	<p>Pasal 1 angka 3 "Bantuan Hukum" adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan".</p>	<p>Pasal 2 "Pemberian Bantuan Hukum oleh POLRI, meliputi : a. konsultasi hukum; b. nasihat hukum; c. saran dan pendapat hukum; d. advokasi; dan e. pendamping".</p> <p>Pasal 8 ayat (1) "Penasihat Hukum/Kuasa Hukum melaksanakan Bantuan Hukum pada : a. tingkat penyidikan; b. tingkat penuntutan; dan/atau c. semua tingkat peradilan".</p> <p>Pasal 9 ayat (1) "Penasihat Hukum melaksanakan Bantuan Hukum mulai dari tingkat pemeriksaan sampai pada sidang Disiplin atau sidang Komisi Kode Etik POLRI"</p>
2.	<p>Pasal 2 "Pemberian Bantuan Hukum oleh POLRI, meliputi : a. konsultasi hukum; b. nasihat hukum; c. saran dan pendapat hukum; d. advokasi; dan e. pendamping".</p>					
3.	<p>Pasal 3 ayat (1) "Yang berhak mendapat Bantuan Hukum : a. institusi POLRI; b. satuan fungsi/satuan kerja; c. pegawai negeri pada POLRI; dan d. keluarga besar POLRI".</p> <p>Ayat (2) "Keluarga besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. keluar pegawai negeri pada POLRI; b. purnawirawan POLRI; c. pensiunan Pegawai Negeri Sipil POLRI; d. warakawuri; e. wredatama; f. duda/janda dari Anggota POLRI/Pegawai Negeri Sipil POLRI"</p>					
4.	<p>Pasal 8 ayat (1) "Penasihat Hukum/Kuasa Hukum melaksanakan Bantuan Hukum</p>					

	<p>pada :</p> <p>a. tingkat penyidikan;</p> <p>b. tingkat penuntutan; dan/atau</p> <p>c. semua tingkat peradilan”.</p>					
5.	Pasal 9 ayat (1) “Penasihat Hukum melaksanakan Bantuan Hukum mulai dari tingkat pemeriksaan sampai pada sidang Disiplin atau sidang Komisi Kode Etik POLRI”					
6.	Pasal 12 “Pemberian Bantuan hukum dalam perkara Perdata ”.					
7.	Pasal 13 “Pemberian Bantuan hukum dalam perkara Pidana ”.					
8.	Pasal 14 “Pemberian Bantuan hukum dalam perkara Praperadilan ”.					
9.	Pasal 15 “Pemberian Bantuan hukum dalam perkara di Pengadilan Agama bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”.					
10.	Pasal 16 “Pemberian Bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara ”.					
11.	Pasal 17 “Pemberian Bantuan hukum dalam perkara Hak Asasi Manusia ”.					
12.	Pasal 18 “Pemberian Bantuan hukum dalam perkara Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik ”.					
13.	Pasal 21 “Administrasi yang harus dilengkapi dalam pemberian Bantuan Hukum, meliputi a. surat perintah; b. surat kuasa khusus; dan c. surat permohonan izin insidentil/izin substitusi/ izin khusus ”;					
14.	Pasal 22 “Semua biaya kegiatan Bantuan Hukum untuk kepentingan institusi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran POLRI sesuai indeks yang berlaku”.					
15.	Pasal 23 ayat (3) “Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ”					

	dilaksanakan dengan cara : a. supervisi; b. asistensi; dan/atau c. monitoring secara berjenjang".					
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : bahan hukum primer diolah

Tabel 36 tersebut di atas menjelaskan tentang adanya kebijakan di lingkungan POLRI dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Anggota POLRI dan Keluarganya dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang meliputi kegiatan konsultasi hukum, nasihat hukum, saran dan pendapat hukum, pendampingan dan advokasi melalui peradilan maupun di luar peradilan.

Bantuan hukum diberikan terhadap Anggota POLRI dan Keluarganya yang menghadapi semua perkara hukum, baik perkara perdata, perkara pidana, perkara praperadilan, perkara di Pengadilan Agama, perkara Tata Usaha Negara, perkara Hak Asasi Manusia, perkara pelanggaran disiplin dan kode etik. Pemberian Bantuan Hukum dilakukan setelah dilengkapi beberapa administrasi, meliputi Surat Perintah, Surat Kuasa Khusus, dan Surat Permohonan izin insidentil/izin substitusi/izin khusus.

Selanjutnya di dalam lingkungan POLRI telah berlaku Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, yang mengatur mekanisme dan tata cara pemberian bantuan hukum, Menurut hukum daya berlakunya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) juga berlaku di pengadilan maupun di luar pengadilan, termasuk apabila Anggota POLRI dan keluarganya ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan masyarakat umum baik statusnya selaku pelapor, penggugat, tersangka/terdakwa, tergugat/turut tergugat termasuk terduga pelanggar. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum

dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam bentuk supervisi, asistensi dan monitoring secara berjenjang.

4.3.2.2.5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 1971

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1971 tertanggal 10 Februari 1971. Surat Edaran ini berisi kebijakan yang mengatur larangan bagi Pegawai Negeri/Anggota ABRI yang bertindak sebagai Pembela/Penasihat Hukum di muka pengadilan umum, dengan pengecualian bilamana telah mendapatkan izin khusus dari pembesar/atasannya dan sungguh sungguh telah memenuhi syarat, maka Pegawai Negeri/Anggota ABRI baru dapat bertindak sebagai Pembela/Penasihat Hukum.

Kebijakan tersebut sewaktu dikeluarkan kedudukan POLRI masih merupakan bagian integral dari ABRI, sehingga Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut diperlukan sebagai kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dilingkungan POLRI, untuk sekarang ini, setelah POLRI berada di luar TNI Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1971 tersebut tetap digunakan sebagai dasar dalam pemberian bantuan hukum terhadap Anggota POLRI dan Keluarganya.

Dipahami untuk kedudukan Surat Edaran tidak masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, namun Surat Edaran Mahkamah Agung RI tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat,⁹⁶ karena diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau di bentuk berdasarkan kewenangan yaitu lembaga Mahkamah Agung RI, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1), dan ayat (2) UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.

⁹⁶ Bandingkan dengan Maria Farida Indrati S., *Op.Cit.*, hlm. 41.

4.4. Implimentasi Bantuan Hukum dalam Praktik Peradilan di lembaga POLRI

4.4.1. Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Anggota POLRI dan Keluarganya yang diduga terlibat perkara hukum dan atau sengketa, sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2010 tentang Hak – Hak Anggota POLRI serta sebagai pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, maka telah dibentuk adanya unit Divisi Hukum (Divkum) di Lingkungan POLRI.

Pasal 26 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menetapkan:

- (1) Setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan **hak – hak lainnya yang adil dan layak.**
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak – hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁹⁷

Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI, menyebutkan bahwa hak – hak lainnya Anggota POLRI meliputi:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. **bantuan hukum** dan perlindungan keamanan;
- c. cuti;
- d. Kapor Polri;
- e. tanda kehormatan;
- f. perumahan dinas/asrama/mess;
- g. transportasi atau angkutan dinas;
- h. MPP;
- i. pensiun;
- j. pemakaman dinas dan uang duka; dan
- k. pembinaan rohani, mental, dan tradisi.⁹⁸

⁹⁷ Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI, menyebutkan :

- (1) Setiap Anggota POLRI beserta keluarganya **berhak memperoleh bantuan hukum** dari dinas baik di dalam mau pun di luar proses peradilan.
- (2) Setiap Anggota POLRI yang melaksanakan tugas khusus menangani perkara tindak pidana tertentu berhak memperoleh perlindungan keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), di atur dengan Peraturan Kapolri.⁹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3), maka mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan keamanan, diatur dengan Peraturan Kapolri. Adapun Peraturan Kapolri yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya tersebut masih menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI (PERKAP) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, di mana untuk melaksanakan kebijakan tersebut diakomodir oleh unit Divisi Hukum di Mabes POLRI.

Bantuan Hukum merupakan bagian dari rawatan kedinasan atas kasus kasus hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas POLRI. Kepentingan Anggota POLRI dan PNS POLRI beserta keluarganya. Pelaksanaan fungsi BANKUM di lingkungan POLRI dilaksanakan oleh fungsi Devisi Hukum POLRI di tingkat Mabes POLRI atau Bidang Hukum di tingkat POLDA dan bagian hukum di tingkat Polrestabes/Polresta/Polres seluruh Indonesia.

Pemberian bantuan hukum yang meliputi : nasihat hukum, konsultasi hukum, pendampingan dan advokasi bagi Anggota POLRI dan Keluarganya ini merupakan konsekuensi bagi Negara Indonesia sebagai Negara hukum, di mana semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*),

⁹⁸ Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI,

⁹⁹ *Ibid.*,

sehingga semua orang termasuk Anggota POLRI dan keluarganya yang terlibat dalam perkara hukum mempunyai hak untuk dibela dan mempunyai hak perlindungan hukum terhadap perkara hukum yang dihadapinya,¹⁰⁰ yang mengedepankan prinsip "*equity before the law*", mengedepankan prinsip "*wetmatigheid*".¹⁰¹ Secara tidak langsung pemberian bantuan hokum bagi Anggota POLRI dan Keluarganya merupakan penerapan Keadilan korektif/komutatif (*remedia*), sebagai upaya pembetulan sesuatu yang salah, berupaya memberi kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, dalam arti hukum diterapkan dengan cara pantas.¹⁰² Mengingat masalah keadilan tidaklah dapat dilepaskan dengan persoalan hukum serta persoalan kemanusiaan.¹⁰³

4.4.1.1. Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

Tata cara permohonan bantuan hukum kepada Penasihat Hukum POLRI, diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan institusi atau dinas diajukan oleh Kepala Satuan Fungsi/Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan;
- b. Untuk kepentingan Anggota POLRI dan PNS POLRI yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas diajukan oleh yang bersangkutan, keluarganya, dan atau Kepala Satuan Kerjanya;
- c. Untuk kepentingan pribadi Anggota POLRI dan PNS POLRI diajukan oleh yang bersangkutan dan atau keluarganya; dan

¹⁰⁰ Notohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹⁰¹ Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 85.

¹⁰² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Op.Cit.*, hlm. 45.

¹⁰³ Theo Huijbers, *Op.Cit.*, hlm. 63.

- d. Untuk Purnawirawan POLRI, Wredatama, Warakawuri, Duda/Janda dari Anggota POLRI/PNS POLRI, diajukan oleh yang bersangkutan.¹⁰⁴

Permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada Kadivkum POLRI atau Kapolda dengan disertai uraian secara kronologis dan benar tentang pokok permasalahan. Khusus untuk permohonan kepada Kadivkum POLRI ditembuskan kepada Kapolri, selanjutnya Kadivkum Polri atau Kapolda mempertimbangkan dapat atau tidaknya diberikan bantuan hukum. Dalam hal disetujuinya permintaan bantuan hukum, Kadivkum POLRI atau Kapolda mengeluarkan Surat Perintah,¹⁰⁵ kepada Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping yang ditugaskan. Setelah Surat Perintah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya Pemohon memberikan surat kuasa khusus kepada Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping yang ditugaskan. Surat Perintah dan Surat Kuasa Khusus tersebut, diberikan kepada Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping **hanya untuk satu perkara** yang dimintakan sesuai dengan permohonan Bantuan hukum.¹⁰⁶

Pemberian Banhatkum dinyatakan berakhir apabila, telah ada putusan pengadilan atau sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik POLRI yang berkekuatan hukum tetap; perkara telah diselesaikan di luar persidangan (*Alternatif Dispute Resolution/ADR*); Surat Kuasa dicabut; dan pemohon meninggal dunia. Apabila pemohon meninggal dunia ahli waris dapat membuat Surat Kuasa Khusus baru. Dalam hal pemohon Bantuan Hukum berkedudukan

¹⁰⁴ Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI,

¹⁰⁵ Surat Perintah adalah surat yang diterbitkan oleh Pimpinan Polri kepada Anggota POLRI dan atau PNS Polri untuk memberikan bantuan hukum, nasehat hukum dan konsultasi hukum.

¹⁰⁶ Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI,

jauh dari yurisdiksi pengadilan, pemohon dapat mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Satuan Fungsi Hukum terdekat.¹⁰⁷

Administrasi Banhatkum yang harus ada, sebagai kelengkapan administrasi bagi Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping POLRI antara lain : Surat Perintah dari Pimpinan; Surat Kuasa dari Anggota POLRI dan Surat Permohonan Izin Insidentil atau Izin Substitusi atau Izin Khusus. Selanjutnya semua biaya kegiatan Bantuan Hukum untuk kepentingan institusi/kepentingan dinas dibebankan kepada Anggaran POLRI, kecuali untuk kegiatan Bantuan Hukum dengan kepentingan perorangan semua menjadi beban dari pemohon Anggota POLRI dan keluarga POLRI.¹⁰⁸

4.4.1.2. Beragam Pelaksanaan Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum (bankum) sebagai tugas pokok fungsi Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum POLRI atau Pendamping, sebagaimana ditentukan pada PERKAP Nomor 2 Tahun 2017, tidak hanya terfokus pada perkara internal pelanggaran disiplin dan Kode Etik POLRI saja, namun juga perkara-perkara institusi POLRI, Anggota POLRI dan Keluarganya, PNS POLRI dan keluarganya terkait dengan eksternal POLRI, yaitu pada Peradilan Umum yang meliputi, Gugatan Perdata, Perkara Pidana, Perkara Praperadilan dan Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, maupun Peradilan HAM, dengan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

Kewajiban Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum POLRI atau Pendamping setelah menerima Surat perintah dan Surat Kuasa Khusus, antara lain :

¹⁰⁷ Pasal 20 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI,

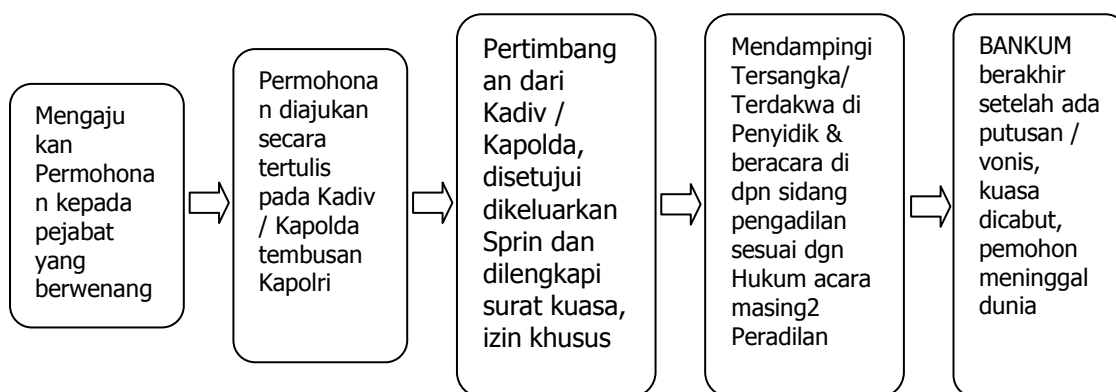
¹⁰⁸ Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI,

- a. mencatat dalam Buku Register di bagian bantuan hukum atau Bidkum Polda;
- b. membuat rencana kerja dan anggaran;
- c. mencari dan mengumpulkan alat bukti dan menganalisis;
- d. meminta arahan kepada Kadivkum POLRI atau Kabid Banhatkum POLRI atau Kabidkum Polda;
- e. mengkoordinasi dengan pihak ketiga dan instansi atau lembaga terkait;
- f. mendaftarkan Surat Kuasa Khusus ke Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara serta mengajukan izin khusus/insidentil beracara;
- g. mengikuti persidangan di pengadilan;
- h. meminta salinan Putusan Hakim; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kapolri atau Kadivkum POLRI atau Kapolda atau Kabidkum Polda.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian pedoman pemberian bantuan hukum (BANKUM) bagi Anggota POLRI dan keluarganya tersebut, maka Prosedur Pemberian bantuan hukum oleh Penasihat Hukum POLRI secara sederhana dapat didiskripsikan dalam Ragaan 8 di bawah ini.

Ragaan : 07

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH PENASIHAT HUKUM POLRI BAGI ANGGOTA POLRI DAN KELUARGANYA



Pada ragaan 8 tersebut di atas menggambarkan tentang prosedur pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI atau keluarganya oleh Penasihat Hukum POLRI, di mulai dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang

¹⁰⁹ Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI.,

berwenang, dalam hal ini diajukan secara tertulis kepada Kadivkum atau Kapolda dengan tembusan Kapolri.

Setelah surat permohonan diajukan akan diberikan pertimbangan dari Kepala Divisi atau Kapolda untuk mendapatkan persetujuan. Apabila disetujui maka segera diterbitkan Surat Perintah yang dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Surat Izin Khusus. Selanjutnya Penasihat Hukum POLRI akan mendampingi Tersangka/ Terdakwa dalam proses penyidikan hingga di depan persidangan pengadilan sesuai dengan hukum acara masing-masing peradilan, hingga pemberian bantuan hukum berakhir yaitu setelah dijatuhkan putusan atau vonis hingga memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), atau sampai kuasa Khusus dicabut, atau pemohon meninggal dunia.

4.4.1.3. Pengendalian dan Pengawasan Bantuan Hukum

Dalam pemberian bantuan hukum perlu dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana diatur pada Pasal 23 PERKAP Nomor 2 Tahun 2017 Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, sebagai berikut :

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Hukum dilakukan secara fungsional oleh Kadivkum POLRI di lingkungan POLRI dan Kabidkum POLDA di tingkat ke wilayahan;
- (2) Pemberi perintah dan kuasa demi untuk kepentingan dinas berwenang mencabut Surat Perintah dan Surat Kuasa kepada Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping;
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan cara :
 - a. supervisi;
 - b. asistensi; dan/atau
 - c. monitoring secara berkala.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas terutama dengan memperhatikan fungsi yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian, yang dalam kondisi tertentu harus dilakukan secara tegas bila perlu dengan paksaan, di sini dimaknai sebagai hukum yang represif karena berhubungan dengan kepentingan dinas, dan dalam kondisi tertentu jika terkait dengan hubungan

timbang balik ketentuan tersebut dan tertib moral, dapat dikoordinasikan secara demokratis secara otonom, atau di sisi lain perlu dilakukan diskresi, sebagai dasar pijakan argumentasi yang bersifat responsif terhadap permohonan yang diajukan, agar dapat mencapai tujuan, maka pertimbangannya dilakukan secara obyektif (memperhatikan kebutuhan Anggota POLRI dan keluarganya),¹¹⁰ sehingga tetap berpijak secara proporsional dan professional dalam melakukan pengendalian dan pengawasan untuk mengabulkan permohonan Anggota POLRI dan keluarganya dalam pemberian bantuan hukum.

4.4.2. Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota POLRI dan Keluarga POLRI

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, bahwa Bantuan Hukum (BANKUM) adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan mau pun di luar peradilan. Pemberian bantuan hukum (bankum) terhadap Anggota POLRI dan Keluarganya tersebut, tidak hanya diberikan pada perkara internal pelanggaran disiplin dan Kode Etik POLRI saja, namun juga terhadap perkara-perkara lain yang melibatkan institusi POLRI, Anggota POLRI dan Keluarganya, PNS POLRI dan keluarganya terkait dengan eksternal POLRI, yaitu pada Peradilan Umum yang meliputi, Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Praperadilan dan Perkara pada Peradilan Agama, Perkara Tata Usaha Negara, maupun Perkara HAM.¹¹¹

¹¹⁰ *Ibid.*, P. 15-17.

¹¹¹ Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa contoh pemberian bantuan hukum terhadap Anggota POLRI dan atau keluarganya dalam perkara pidana, perkara perdata, perkara pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota POLRI, dan Perkara Pelanggaran Peraturan Kode Etik Profesi POLRI,¹¹² sebagai berikut :

4.4.2.1. Bantuan Hukum Terhadap Anggota POLRI dan Keluarga POLRI dalam Perkara Pidana

1. Terdakwa Abd. Latif anggota Polsek Sedati Polresta Sidoarjo

perkaranya di sidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan di dampingi Penasihat Hukumnya Kopol Ponikah, SH, dan Penata Tingkat I Sholikah, SH, MH dari Bidang Hukum Polda Jatim dan Kopol Urias Saban, SH dari Subbagkum Polres Sidoarjo. Berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda Jatim No. : Sprin/1048/I/2016 tanggal 22 Januari 2016, Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januri 2016.

Kronologi perkara Terdakwa Abd. Latif selaku anggota Reskrim Polsek Sedati Polres Sidoarjo, Terdakwa Abd. Latif pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira jam 10.00 wib telah ditangkap di kantor Polsek Sedati Polres Sidoarjo karena sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya, dengan barang bukti yang diamankan di tempat kost Abd. Latif di Jl. Pasar Wisata No. 23 kamar No. 02 Sedati Sidoarjo berupa barang bukti Narkotika jenis sabu sejumlah 13 (tiga belas) kilo gram dan pil 22 (dua puluh dua) butir. Bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dilakukan oleh Abd. Latif bersama-sama dengan Sdri. Indri Rachmawati Binti M. Yahya. Terdakwa Abd. Latif

¹¹² Bahan Hukum Sekunder, Hasil Studi dokumen di Bidang Hukum Polda Jatim Surabaya, oktober tahun 2012 s/d agustus tahun 2013, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya.

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"; sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.¹¹³

Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2451/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 1 Februari 2016 perihal putusan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"; sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa Abd. Latif dengan pidana **MATI**, namun Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 154/PID SUS/2016/PT.SBY tanggal 19 April 2016, dalam putusannya "Memperbaiki dan menguatkan atas putusan PN Surabaya tanggal 1 Februari 2016 Nomor : 2451/Pid.Sus/2015/PN.Sby perihal putusan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"; sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114

¹¹³ Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2451/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 1 Februari 2016

ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹¹⁴ Terdakwa Abd. Latif dipidana **MATI**, Perkembangan perkara ini Terdakwa Abd. Latif telah mengajukan upaya hukum Kasasi.

Sesuai dengan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1867 K/PID.SUS/2016 tanggal 10 November 2016** telah memperbaiki atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 154/PID.SUS/2016/PT.SBY tanggal 19 April 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2451/Pid.Sus/2015/PN.Sby tanggal 1 Februari 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sepanjang terhadap diri Terdakwa I, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I INDRI RAHMAWATI binti M. YAHYA dan Terdakwa II ABD. LATIF bin MUNAWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP dan Terdakwa II dengan pidana **MATI**.¹¹⁵

Status perkara ini Terdakwa Abd. Latif anggota Rekrim Polsek Sedati Polresta Sodoarjo yang berhubungan dengan **kepentingan pribadi/individu** dari Terdakwa Abd. Latif.

2. **Terdakwa Irwantono anggota Polres Sumenep** perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan di dampingi Penasihat Hukumnya Akbp A.S Warseno. SH, M.H, Kopol Sugiharto, SH, M.Hum, dari

¹¹⁴ Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 154/PID.SUS/2016/PT.SBY tanggal 19 April 2016

¹¹⁵ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1867 K/PID.SUS/2016 tanggal 10 November 2016

Bidang Hukum Polda Jatim dan Aiptu Kliwon bin Kasan, SH, Briptu Eko Ari Wahyudi, SH dari Subbagkum Polres Sumenep. Berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda Jatim No. Pol. : Sprin/1233/XI/2011 tanggal 15 Desember 2011, Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2011 dan Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo No. : 002/IK/PN.SDA/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011.

Kronologi perkara Terdakwa Irwantono selaku anggota Unit Resmob Polres Sumenep bersama sama dengan rekannya melakukan kegiatan kring reserse pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Taman Bunga jalan Tronojoyo Kabupaten Sumenep. Sewaktu Terdakwa bertugas didapatkan ada 2 (dua) orang pelaku pencurian terhadap Sepedar motor Mio warna putih yang dibawa lari oleh Ahmad Laili (meninggal dunia di tempat kejadian) terkena tembakan dari Terdakwa, sewaktu membonceng pelaku yang bernama Agus Hariyanto (ditangkap dan dipidana di PN Sumenep). Akibat Terdakwa yang melakukan Tembakan peringatan dan tembakan berulang kepada para pelaku pencurian, juga mengakibatkan RB Moh Ridwan Fatah yang sedang duduk di depan toko jamu Celok Manis di Sumenep terluka di kepala sebelah kiri dekat ubun ubun, akhirnya meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Sumenep. RB Moh Ridwan Fatah dilakukan otopsi di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep telah ditemukan proyektil dari kepala korban.¹¹⁶

Tindak lanjut perkara Terdakwa Irwantono tidak di sidang di PN Sumenep tetapi di sidang di PN Sidoarjo yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 182/KMA/SK/XI/2011 tanggal 18 November 2011.

¹¹⁶ Amar Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 1084/Pid.B/2011/PN.Sda tanggal 21 Februari 2012

Terdakwa Irwantono telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena kesalahan/kealpaannya menyebabkan matinya RB. Moh Ridwan Fatah yakni "Barang siapa karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, sebagaimana Pasal 359 KUHPidana.

Atas **Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 1084/Pid.B/2011/PN.Sda tanggal 21 Februari 2012** perihal putusan tindak pidana karena salahnya menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam Pasal 359 KUHP dengan Narapida Brigadir Irwantono, di pidana penjara selama 2 (dua) tahun, namun perkara pidana sudah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Brigadir Irwantono selesai menjalankan pidana penjara di LP Sidoarjo, kembali melaksanakan dinas di Polres Sumenep, karena perbuatan pidana yang dilakukan berhubungan dengan kepentingan dinas, untuk menangkap pelaku pencurian sepeda motor Yamaha Mio, tidak untuk menembak korban RB Moh Ridwan Fatah. Pertimbangan Pemberian bantuan hukum kepada Terdakwa Irwantono, yang berhubungan dengan **kepentingan dinas** untuk menegakan hukum di Satuan Reserse Kriminal Polres Sumenep.

3. **Terdakwa Sigit Dwi Susanto anggota Polres Banyuwangi** perkaranya di sidangkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan di dampingi Penasihat Hukumnya Kopol Sugiharto, SH, M.Hum, Brigadir Nanang Hendra Irawan SH, M.H, Penata 1 Rachmad Hardadi, SH, M.H dari Bidang Hukum Polda Jatim dan Akp H. Edy Hartono dan Aipda Bambang Purwanto, SH dari Subbagkum Polres Banyuwangi. Berdasarkan Surat Perintah dari

Kapolda Jatim No. : Sprin/890/IX/2012 tanggal 10 September 2012, Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012.

Kronologi perkara Terdakwa Sigit Dwi Susanto selaku anggota Polres Banyuwangi, namun dalam status Bawah Kendali Operasi (BKO) atau diperbantukan dinas di Direktorat Narkoba Polda Jatim untuk mengungkapkan kasus kasus Narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Jember dan Polres Banyuwangi, khususnya untuk mengejar target jaringan Narkoba bernama Muklas yang diduga kuat beroperasi di wilayah hukum Polres Banyuwangi. Terdakwa Sigit Dwi Susanto pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sekira jam 13.30 wib bertempat di rumah terdakwa sendiri Perum Griya Giri Indah Blok G No. 7 Kel Klatak, Kec Kalipuro Kab Banyuwangi. Terdakwa diduga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Presursor yakni "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu sabu sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹¹⁷

Atas Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 692/Pid.B/2012/PN.Bwi tanggal 17 Desember 2012 perihal putusan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I berupa sabu dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Terdakwa Brigader Sigit Dwi Susanto bin Pijanto, di pidana penjara 5 (lima) tahun, namun Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding.

¹¹⁷ Amar Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 692/Pid.B/2012/PN.Bwi tanggal 17 Desember 2012

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 110/Pid/201/PT.SBY tanggal 8 Maret 2013, dalam putusannya "Memperbaiki putusan PN Banyuwangi tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 692/Pid.B/2012/PN.Bwi yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sigit Dwi Susanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dan menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.¹¹⁸ Perkembangan perkara ini Terdakwa Sigit Dwi Susanto telah mengajukan upaya hukum Kasasi, Terdakwa sudah mengajukan Memori Kasasi tanggal 3 April 2013 ke Mahkamah Agung RI.

Sesuai dengan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1307 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013** telah memperbaiki atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 110/Pid/201/PT.SBY tanggal 8 Maret 2013, dalam putusannya "Menjatuhkan Terdakwa Sigit Dwi Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I" Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) dan menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.¹¹⁹ Status perkara ini Terdakwa Sigit Dwi Susanto yang berhubungan dengan **kepentingan pribadi/individu** dari Terdakwa Sigit Dwi Susanto.

¹¹⁸ Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 110/Pid/201/PT.SBY tanggal 8 Maret 2013

¹¹⁹ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1307 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013

4. **Terdakwa Yuyun Wilujeng adalah istri Briptu Sukolik anggota Direktorat Polisi Air Polda Jatim** dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Pasal 374 KUHP, perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan didampingi Penasihat Hukumnya Akbp Jusman Sitorus. SH, M.H, Kopol Sugiharto, SH, M.Hum, Akp Imam Suroso, SH, M.Hum dari Bidang Hukum Polda Jatim. Berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda Jatim No. Pol. : Sprin/338/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007, Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2007 dan Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. : 04/Izin Khusus/2009 tanggal 8 April 2009.

Kronologis perkara Terdakwa Yuyun Wiluyeng sekira bulan Januari s/d Maret 2007 di kantor PT Radiance Jl Polisi Istimewa No. 20 Surabaya, tempat Terdakwa bekerja diduga telah menggelapkan uang sebesar Rp 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan pelapor Laurensius Herman Soegondo.¹²⁰

Atas perkara Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 20 Februari 2010 Perkara terdakwa Yuyun Wilujeng adalah istri Briptu Sukolik dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Pasal 374 KUHP, oleh Pengadilan Negeri Surabaya diputus bebas (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan¹²¹, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan Kasasi;

Selanjutnya perkara Terdakwa di tingkat Kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1061 K/Pid/2011 tanggal 28 Maret 2012 Perkara terdakwa Yuyun Wilujeng adalah istri sah dari Briptu Sukolik dalam

¹²⁰ Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 20 Februari 2010

¹²¹ *Ibid.*,

tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam Pasal 374 KUHP. Dalam pertimbangan hukumnya tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI "Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti yang dapat membuktikan, bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik PT Radiance sejumlah Rp 4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) karena dalam perusahaan tersebut yang mempunyai tugas untuk menagih uang sewa fotokopi bukan hanya Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHPidana. Dalam hal ini di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung RI telah mengadili dengan putusan "Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Surabaya". Dalam hal ini berarti putusan Kasasi telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 860/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 20 Februari 2010 yakni menyatakan Terdakwa bebas (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan¹²². Pertimbangan Pemberian bantuan hukum kepada Terdakwa untuk **kepentingan pribadi/individu**, status Terdakwa adalah selaku istri sah dari Briptu Sukolik anggota Direktorat Polisi Air Polda Jatim.

5. **Terdakwa Feri Agoestina Maindah Ekowati anak kandung dari Aiptu Agus Subakti (anggota Polsek Sukolilo Polrestabes Surabaya),** untuk perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan didampingi Penasihat Hukumnya Akbp Drs. I Dewa Nyoman S. SH, Msi, Kompol Suroso, SH, Kompol Sugiharto, SH, M.Hum, Akp Imam Suroso, SH, M.Hum dan Aiptu Imam Mahmudi, SH, M.Hum. Berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda Jatim

¹²² Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1061 K/Pid/2011 tanggal 28 Maret 2012

No. Pol. : Sprin/486/V/2009 tanggal 11 Mei 2009, Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2009 dan Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. : 05/Izin Khusus/2009 tanggal 16 Juli 2009.

Kronologi perkara terdakwa Feri Agoestina Maindah Ekowati pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2009 sekira jam 13.00 wib bertempat di kantor PT Sumber Makmur Bangkit di Jl Prapat Kurung Selatan No. 5 Surabaya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena jabatan. Penguasaan terhadap barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah.

Terdakwa bekerja di PT Sumber Makmur Bangkit bergerak dibidang jasa impor ekspor atau Ekspedisi Muatan Kapal dan Laut (EMKL) sebagai staf impor, tugas dan tanggung jawabnya antara lain membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB), menangani order secara langsung dari costumer, menerima dokumen awal impor (*Invoice, Packing List* dll) dan penebusan biaya *shipping line/fowader*. Terdakwa bekerja di perusahaan kurang lebih 1 (satu) tahun dan dengan gaji perbulan Rp 900.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-.

Pada waktu terdakwa menjalankan pekerjaannya terdakwa telah menerima uang tunai sebanyak USD 2500 sama dengan Rp 30.187.500,- (tiga puluh juta seratus delapan tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diterima terdakwa dari Sdr. ABBAS THOFA (PT Mega Surya Mas) untuk biaya pengambilan *Delivery Order* (DO), setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa, ternyata tidak diserahkan ke bagian keuangan Perusahaan PT Sumber Makmur Bangkit, namun keesokan harinya terdakwa mengatakan bahwa uang

tersebut telah hilang di kaleng di mana terdakwa menaruh, padahal mekanisme perusahaan setiap pegawai atau karyawan yang menerima uang dari hasil relasi atau customer untuk uang tersebut harus langsung diserahkan ke bagian keuangan bukan di taruh di kaleng atau di omplong, seperti pengakuan terdakwa kepada pimpinan. Atas peristiwa tersebut PT Sumber Makmur Bangkit oleh terdakwa dirugikan sejumlah Rp 30.187.500,- (tiga puluh juta seratus delapan tujuh ribu lima ratus rupiah).¹²³

Perkara terdakwa telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan No. 2409/Pid.B/2009/PN.Sby pada tanggal 11 September 2009 yang putusannya :

1. Menyatakan terdakwa : Feri Agoestina Maindah Ekowati tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslaag alle rechtvervolging*);
3. Memerintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan kota setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.¹²⁴

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor :

225K/PID/2010 tanggal 2 Juni 2010 Perkara terdakwa Feri Agoestina Maindah Ekowati adalah anak kandung dari Aiptu Agus Subakti (anggota Polsek Sukolilo Polrestabes Surabaya) dalam tindak pidana penggelapann dalam jabatan dalam Pasal 374 KUHP, Putusan Kasasi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan putusan bebas (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan¹²⁵, sehingga perkara pidana sudah

¹²³ Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2409/Pid.B/2009/PN.Sby pada tanggal 11 September 2009

¹²⁴ *Ibid.*,

¹²⁵ Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 225K/PID/2010 tanggal 2 Juni 2010

berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan Pemberian bantuan hukum kepada Terdakwa untuk **kepentingan pribadi/individu**, status Terdakwa adalah selaku anak kandung dari Aiptu Agus Subakti (anggota Polsek Sukolilo Polrestabes Surabaya).

4.4.2.2. Bantuan Hukum Terhadap Anggota POLRI dan Keluarga dalam Perkara Perdata

Berawal dari gugatan Ny. Theresia Retno Murni Handayani (Penggugat I) dan Ny. Mariana Sri Marmiati (Penggugat II) disebut juga Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasuruan Kota tanggal 22 April 2013 terdaftar dengan register perkara No. 12/Pdt.G/2013/PN.Psr tanggal 22 Mei 2013. Pihak yang digugat adalah Thomas Marhendra Wiyana (selaku Tergugat) dan Andreas Supriyanto Yuwono (selaku Turut Tergugat), adapun substansi gugatan dari Para Penggugat adalah Hibah. Hubungan antara para pihak baik dari pihak Para Penggugat maupun dari pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat adalah terikat hubungan saudara kandung, mengingat Para Penggugat selaku kakak kandung dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat.

Tindak lanjut dari gugatan, maka **Kompol Thomas Marhendra Wiyana S T Nrp 67040630 jabatan Kasubbag Fasjas Biro Sarpras Polda Jatim selaku Tergugat**, mengajukan bantuan hukum kepada Bidang Hukum Polda Jatim. Selanjutnya dengan Surat Perintah Kapolda Jatim No : Sprin/638/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 ditugaskan kepada Kompol Dr. Imam Suroso, S.H, M.Hum, Kompol Nurul Anatroh, S.H, M.H dan Ipda Daky Dzul Qornain, S.H dari anggota Bidang Hukum Polda Jatim. Dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013 dan Surat Izin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Kota No. : 01/Izin Khusus/2013 tanggal Juli 2013.

Gugatan Perdata masih dalam proses persidangan di PN Pasuruan Kota, yang berhubungan dengan **kepentingan pribadi/individu** dari Kompol Thomas Marhendra Wiyana S T Nrp 67040630 jabatan Kasubbag Fasjas Biro Sarpras Polda Jatim selaku Tergugat, pemberian bantuan hukum sampai dengan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

4.4.2.3. Bantuan Hukum Terhadap Anggota POLRI dan Keluarga dalam Perkara Pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota POLRI

Berdasarkan Nota Dinas Kabid Teknologi Informasi Polda Jatim Nomor : B/ND-248 /X/2012/Bid TI tanggal 9 Oktober 2012 perihal Permohonan anggota Perwira untuk pembela Sidang Disiplin a.n. KOMPOL TRISNO PRIYONO, S.H. Surat Perintah Kabidkum Polda Jatim Nomor : Sprin/766/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, sebagai pendamping Terperiksa KOMPOL TRISNO PRIYONO, S.H. NRP 60110284 Anggota Bid TI Polda Jatim. Pelaksanaan sidang disiplin Terperiksa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 di Polda Jatim oleh Pendamping Terperiksa Acp Ninik Handayani, S.H., M.M Brigadir Krisdian Apristandi, S.E., M.H dari Bidang Hukum Polda Jatim.

Terperiksa atas nama KOMPOL TRISNO PRIYONO. S.H. NRP 60110284 Jabatan Analis Kebijakan Pertama Subbid Tekinfo Bidang Teknologi Informasi Polda Jatim, diduga telah melakukan pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b,d dan f) PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI yang substansinya : Dalam pelaksanaan tugas, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat, wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran

dan rasa tanggung jawab dan wajib menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.¹²⁶

Hasil keterangan Terperiksa KOMPOL TRISNO PRIYONO, S.H. NRP 60110284 Jabatan Analis Kebijakan Pertama Subbid Tekinfo Bidang Teknologi Informasi Polda Jatim terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b,d dan f) PPRI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI yang substansinya : Dalam pelaksanaan tugas, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik – baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat, wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab dan wajib menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.¹²⁷

Pimpinan Sidang Disiplin telah membacakan Putusan Nomor : Kep/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 a.n. Terperiksa KOMPOL TRISNO PRIYONO, S.H. NRP 60110284 Jabatan Analis Kebijakan Pertama Subbid Tekinfo Bidang Teknologi Informasi Polda Jatim dengan Sanksi Administratif Tunda UKP 1 Periode dan Tunda Dik 1 Periode.¹²⁸ Terperiksa tidak mengajukan keberatan atas putusan Anjum/Pimpinan dari Terperiksa. Pertimbangan Pemberian bantuan hukum kepada Terperiksa untuk **kepentingan pribadi/individu** dalam pelaksanaan sidang disiplin di Mapolda Jatim Surabaya.

¹²⁶ Putusan Sidang Disiplin Nomor : Kep/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 a.n. Terperiksa KOMPOL TRISNO PRIYONO, S.H. NRP 60110284

¹²⁷ *Ibid.,*

¹²⁸ *Ibid.,*

4.4.2.4. Bantuan Hukum Terhadap Anggota POLRI dan Keluarga dalam Perkara Pelanggaran Peraturan Kode Etik Profesi POLRI

Berdasarkan Nota Dinas Kabidpropam Polda Jatim Nomor : B/ND-347/V/2013/Bidpropam tanggal 31 Mei 2013 perihal Permintaan Pendamping Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) a.n. Terduga Pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto; Surat Perintah Kabidkum Polda Jatim Nomor : Sprin/298/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013, tentang penunjukkan sebagai Pendamping Terduga Pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto. Pelaksanaan Sidang KKEP pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 tempat ruang sidang Bidpropam Polda Jatim, atas nama Terduga Pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto dengan Pendamping Terduga Pelanggar oleh Acp Ninik Handayani, S.H., M.M. dan Acp Rr. Eliya Ayuningtyas, S.H. dari Bidang Hukum Polda Jatim.

Terduga Pelanggar atas nama BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto, diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI jo Pasal 21 ayat 3 huruf (e) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan atau Pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin jo Pasal 21 ayat 3 huruf (i) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang Substansinya : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya

secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, Sanksi Administratif berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang melakukan : meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi : Dijatuhi hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota POLRI.¹²⁹

Terduga Pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI jo Pasal 21 ayat 3 huruf (e) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan atau Pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin jo Pasal 21 ayat 3 huruf (i) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.¹³⁰

Hasil keterangan Para Saksi, Terduga Pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto terbukti secara sah

¹²⁹ Putusan Sidang KKEP Nomor : PUT KKEP/10/VI/2013/KKEP tanggal 28 Juni 2013 a.n. Terduga Pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201

¹³⁰ *Ibid.*,

telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam asal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI jo Pasal 21 ayat 3 huruf (e) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan atau Pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin jo Pasal 21 ayat 3 huruf (i) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang Substansinya : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, sanksi administratif berupa Rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan : meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi : dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota POLRI.¹³¹

Ketua Komisi telah membacakan Putusan Sidang KKEP No. PUT KKEP/10/VI/2013/KKEP tanggal 28 Juni 2013 a.n. Terduga Pelanggar BRIPTU

¹³¹ *Ibid.*,

RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto dengan Sanksi : bersifat Etika "Berupa Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan"; bersifat Administratif "Berupa Direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota POLRI".¹³² Terduga pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI NRP 88060201 Anggota Polres Mojokerto telah mengajukan Banding ke Atasan Ankum (Kapolda Jatim) atas keputusan sidang KKEP tanggal 28 Juni 2013. Hasil banding dari Terduga Pelanggar oleh Atasan Ankum (Kapolda Jatim) ditolak dan menguatkan putusan KKEP untuk ditetapkan PTDH dari dinas POLRI. Pertimbangan Pemberian bantuan hukum kepada Terduga Pelanggar untuk **kepentingan pribadi/individu** dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi/KKEP di Mapolda Jatim Surabaya.

Selanjutnya dapat diketahui dengan jelas yang berkaitan dengan **pemberian bantuan hukum kepada Anggota POLRI dan Keluarga POLRI** pada tabel : 37 di bawah ini :

¹³² *Ibid.,*

Tabel : 37 Pemberian Bantuan Hukum kepada Anggota POLRI dan Keluarga POLRI pada **Bidang Hukum Polda Jatim di Surabaya.**

NO.	JENIS PERKARA	SUBJEK HUKUM	STATUS HUBUNGAN PERKARA	DASAR PUTUSAN PERKARA	PENASIHAT HUKUM	POLRI/ KELUARGA POLRI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<p>Pidana</p> <p>a. Tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman (Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);</p> <p>b. Tindak pidana karena salahnya menyebabkan orang lain meninggal (Pasal 359 KUHP);</p> <p>c. Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika golongan I (Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);</p> <p>d. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 374 KUHP);</p> <p>e. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Pasal 374</p>	<p>Aiptu Abd. Latif anggota Reskrim Polsek Sedati Polresta Sidoarjo.</p> <p>Brigader IRWANTONO anggota Polres Sumenep;</p> <p>Brigader SIGIT DWI SUSANTO anggota Polres Banyuwangi;</p> <p>YUYUN WILUJENG (isteri sah dari Briptu SUKOLIK anggota Direktorat Polisi Air Polda Jatim);</p> <p>FERI AGOESTINA MAINDAH EKOWATI</p>	<p>Kepentingan perorangan atau individu</p> <p>Kepentingan dinas;</p> <p>Kepentingan perorangan atau individu;</p> <p>Kepentingan perorangan atau individu;</p> <p>Kepentingan perorangan</p>	<p>Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1867 K/PID.SUS/2016 tanggal 10 November 2016. dengan Pidana MATI</p> <p>Putusan PN Sidoarjo No. 1084/Pid.B/2011/PN.Sda Tanggal 21 Februari 2012. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun;</p> <p>Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1307 K/PID.SUS/2013 tanggal 30 Oktober 2013. Pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 50.000,000,- (lima puluh juta rupiah);</p> <p>Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1061 K/PID/2011 tanggal 28 Maret 2012. Terdakwa bebas dari segala dakwaan;</p> <p>Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 225 K/PID/2010</p>	<p>POLRI</p> <p>POLRI</p> <p>POLRI</p> <p>POLRI</p>	<p>POLRI</p> <p>POLRI</p> <p>POLRI</p> <p>KELUARGA POLRI</p> <p>KELUARGA POLRI</p>	<p>Putusan sudah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>Putusan sudah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>Putusan sudah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>Putusan sudah berkekuatan hukum tetap;</p> <p>Putusan sudah berkekuatan hukum tetap;</p>

	KUHP);	(anak kandung dari Aiptu AGUS SUBAKTI anggota Polsek Sukolilo Polrestabes Surabaya);	an atau individu;	tanggal 2 Juni 2010. Terdakwa bebas dari segala dakwaan;			hukum tetap;
2.	Perdata a. Substansi gugatan tentang Hibah;	Penggugat Ny. THERESIA RETNO MURNI HANDAYANI dkk, untuk Tergugat KOMPOL THOMAS MARHENDRA WIYANA ST (anggota Sarpras Polda Jatim);	Kepentingan perorangan atau individu	Gugatan masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Pasuruan Kota;	POLRI	POLRI	Putusan belum berkekuatan hukum tetap;
3.	Pelanggaran Peraturan Disiplin a. Tidak mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedisiplinan yang berlaku (Pasal 4 huruf F PPRI No. 2 Tahun 2003);	Terperiksa KOMPOL TRISNO PRIYONO, SH (anggota Teknologi Informasi Polda Jatim);	Kepentingan perorangan atau individu	Putusan Hukuman Disiplin No : Kep/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012. Sanksi administratif tunda usulan kenaikan angkat 1 periode dan tunda pendidikan 1 periode;	POLRI	POLRI	Terhukum tidak mengajukan keberatan (menerima putusan hukuman disiplin);
4.	Pelanggaran Peraturan Kode Etik Profesi POLRI a. Meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut (Pasal 14 ayat 1 huruf a PPRI No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian Anggota POLRI).	Terduga pelanggar BRIPTU RANI INDAH YUNI NUGRAENI (anggota Polres Mojokerto).	Kepentingan perorangan atau individu	Putusan sidang Komisi Kode Etik POLRI No : PUT/KKEP/10/VI/2013/KKEP tanggal 28 Juni 2013. Sanksi berupa "direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Anggota POLRI.	POLRI	POLRI	Terhukum mengajukan banding ke Atasan Anum (Kapolda Jatim), namun keputusannya menolak banding dan menguatkan putusan PTDH.

Sumber : bahan hukum **Sekunder** diolah

Dalam Tabel 37 tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan Hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI dilaksanakan oleh dinas POLRI baik untuk **kepentingan dinas dan**

kepentingan pribadi/individu, hingga status perkara berkekuatan hukum tetap;

2. Pelaksanaan pemberian bantuan Hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya dilaksanakan oleh dinas POLRI (Divisi Hukum di Mabes POLRI, Bidang Hukum di Polda dan Bagian Hukum di Polrestabes/Polresta/Polres seluruh Indonesia), meliputi perkara pidana, gugatan perdata, perkara pelanggaran Disiplin, dan perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI.
3. Pemberian bantuan hukum bagi anggota POLRI dan Keluarga POLRI di Bidang Hukum Polda Jatim yakni Untuk perkara pidana sebanyak 5 (lima) perkara, di mana 3 (tiga) perkara merupakan perkara yang melibatkan Anggota POLRI, dari yang diberikan putusan pidana penjara sampai dengan putusan pidana **MATI** dan 2 (dua) perkara merupakan perkara yang melibatkan keluarga Anggota POLRI (selaku **istri dan anak kandung** dari anggota POLRI). Dalam perkara perdata Anggota POLRI, selaku pihak penggugat dari pihak masyarakat terkait dengan gugatan hibah.
4. Khusus untuk perkara pelanggaran Disiplin, dan perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI diberikan kepada Anggota POLRI, **tidak untuk keluarga POLRI**, karena hubungannya dengan jenis pelanggaran pelaksanaan tugas dan wewenang bagi setiap Anggota POLRI.

4.4.3. Pengawasan dan Penindakan dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga polri

Perihal pemberian bantuan hukum perlu dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana diatur pada Pasal 23 Peraturan Kapolri (PERKAP) No.

2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI, sebagai berikut :

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Hukum dilakukan secara fungsional oleh Kadivkum POLRI di lingkungan POLRI dan Kabidkum POLDA di tingkat ke wilayahan;
- (2) Pemberi perintah dan kuasa demi untuk kepentingan dinas berwenang mencabut Surat Perintah dan Surat Kuasa kepada Penasihat Hukum atau Kuasa Hukum atau Pendamping;
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dengan cara :
 - a. supervisi;
 - b. asistensi; dan/atau
 - c. monitoring secara berkala.

Dilihat dari ketentuan di atas, Kadivkum POLRI dalam struktur organisasi Mabes Polri berada di bawah Kapolri yang secara struktural bertugas dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pada pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Mabes Polri dan secara fungsional sebagai pembina pengemban fungsi pemberian Bantuan Hukum pada satuan bawah, yakni Polda yang secara struktural diemban oleh Kabidkum Polda di tingkat wilayah. Dengan demikian Kabidkum Polda mengemban tugas, wewenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pemberian Bantuan Hukum pada lingkungan Polda secara struktural dan pada satuan tingkat wilayah secara fungsional kepada sub bagian hukum di Polrestabes/Polresta/Polres seluruh Indonesia.

Diperhatikan dari rumusan tugas dan wewenang Kepolisian, kondisi yang membuat peluang besar untuk tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dalam penyelenggaraan Kepolisian, adalah tugas dan wewenangnya sebagai pelaksana pemberian Bantuan Hukum selaku “Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping”, dari Anggota POLRI dan keluarganya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1) ayat (2) dan Pasal

29 ayat (1) ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, Pasal 2, Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP RI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota POLRI, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) PP RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota POLRI dan Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI. Oleh karena itu serangkain tindakan pemberian Bantuan Hukum perlu mendapatkan pengawasan dan pengendalian yang ketat secara struktural maupun fungsional, mengingat selaku Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping yang dilakukan oleh Penasihat Hukum POLRI merupakan langkah awal dan pintu depan bagi Anggota POLRI dan keluarganya untuk mendapatkan suatu keadilan yang berkaitan dengan proses tindak pidana, gugatan perdata, gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik POLRI. Agar tidak menjadi faktor terbentuknya opini negatif masyarakat, maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus tetap berorientasi pada asas tujuan diberikannya tugas dan wewenang (*specialiteitbeginnel*) yakni selaku Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping. Dilihat dari sisi kelembagaan, yakni subjek (pengawas) dan objek (yang diawasi), pengawasan kepolisian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pengawasan yang bersifat internal dan bersifat eksternal.

4.5. Pendapat Para Ahli tentang Pemberian Bantuan Hukum

4.5.1. Pendapat Artidjo Alkostar

Sebagaimana dikemukakan Artidjo Alkostar (Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung RI) Prinsip dasar berlakunya hukum adalah tidak boleh melanggar asas persamaan di depan hukum, maka Negara Indonesia tidak boleh melanggar Konvensi Internasional, termasuk *Universal Declaration of Human*

Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) ini mengingat sudah banyak dilakukan meratifikasi konvensi internasional, bahkan sudah ada yang diundangkan. Di era reformasi negara Indonesia sudah mendekati prinsip-prinsip hukum, sebagaimana negara negara demokrasi, untuk penegakan hukum dan pelayanan hukum harus berdasarkan prinsip dasar yang berlaku dalam Konvensi Internasional, UUD Negara RI Tahun 1945 dan prinsip dasar penegakan hukum.

Bahwa **Bantuan hukum sangat erat dengan hak konstitusional**, hak hak dasar, hak yang diperlakukan untuk mendapatkan akses keadilan, hak konstitusional ini diatur dalam konstitusi setiap negara, untuk negara Indonesia dapat dilihat pada amandemen UUD Negara RI tahun 1945 khususnya bab tentang HAM pada Pasal 28 A s/d Pasal 28 I. Prinsip dasar berlakunya hukum adalah tidak boleh melanggar asas persamaan di depan hukum. Di era reformasi negara Indonesia sudah mendekati prinsip-prinsip hukum, sebagaimana negara negara demokrasi, untuk penegakan hukum dan pelayanan hukum harus berdasarkan prinsip dasar yang berlaku dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan prinsip dasar penegakan hukum. Adapun mekanisme dan prosedur pelayanan hukum kepada Anggota POLRI dan Keluarganya sama dengan aturan hukum yang berlaku di warga sipil.

Bahwa setiap warga negara sebagaimana dalam UU Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dalam penegakan hukum dan pemberian pelayanan hukum, maka tidak dapat dipisahkan antara warga sipil dan Anggota POLRI/ABRI. Bahwa inti dari hukum adalah keadilan, tidak boleh ada orang di Indonesia ini diproses hukum yang mengabaikan pemberian pelayanan hukum yang wajar. Dalam penegakan hukum berlakunya asas *fairness fair* adalah harus ada perhatian kepada kepada setiap orang baik terdakwa, tergugat, penggugat

termasuk Anggota POLRI dalam semua tingkat pemeriksaan baik penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. **Bantuan hukum** adalah bagian dari implementasi tentang penegakan keadilan. Pada prinsipnya setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang benar dan adil, dalam ilmu hukum disebut *Due Process of Law*.

Dalam kenyataannya penegakan hukum yang sekaligus memberikan perlindungan atas Hak Asasi Manusia adalah suatu kondisi yang sulit, namun tekad untuk melakukan tindakan agar tidak terjadi pelanggaran atas hak hak dari Tersangka, Terdakwa dan Terpidana termasuk pelaku tindak pidana dari Anggota POLRI. Selanjutnya sudah waktunya perlu adanya gerakan bantuan hukum di Lembaga POLRI secara aktif dan seluas luasnya.

Bahwa pemberian bantuan hukum terhadap Anggota POLRI dan keluarganya dalam keadaan darurat dapat dibenarkan untuk diberikan oleh institusi POLRI, dengan alasan : terhadap kasus kasus tertentu, kebutuhan institusional, diberikan dengan cuma cuma, dilakukan secara tidak komersial dilingkungan POLRI bukan untuk jasa Advokat secara umum dan yang terpenting memenuhi kualifikasi dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum. Faktanya para Advokat tidak menjangkau kebutuhan pemenuhan pemberian bantuan hukum yang lebih luas termasuk yang dibutuhkan bagi Anggota POLRI dan keluarganya, oleh karena itu UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus direvisi dengan alasan yang mendasar adalah peranan Advokat yang monopoli dalam pelayanan hukum khususnya pemberian bantuan hukum. Selanjutnya harus dilakukan **kebijakan normatif** yang diselaraskan dengan realita pelayanan hukum dan pemberian bantuan hukum.

Bahwa kebijakan formulasi bagi Anggota POLRI dan keluarganya harus berorientasi lebih mengedepankan untuk mengatur hak hak tersangka, hak hak korban sudah dikaji dalam RUU Hukum Acara Pidana, bahkan ada *restorative justice* yang bisa dilakukan mediasi penal. Mediasi penal kepada korban tindak pidana yang sifatnya ringan dapat dibenarkan, yang berlaku terhadap pelaku dari warga sipil dan Anggota POLRI dan keluarganya. Bagi Anggota POLRI yang mendapatkan permasalahan hukum karena berhubungan dengan **kepentingan dinas** sepenuhnya ada alasan pembenar dari UU untuk diberikan pelayanan hukum dan pemberian bantuan hukum, sedangkan terhadap Anggota POLRI dan keluarganya yang mendapatkan permasalahan hukum karena berhubungan dengan **kepentingan pribadi/individu** dapat untuk diberikan pelayanan hukum dan pemberian bantuan hukum, karena tidak ada larangan dan tidak ada masalah secara hukum yang harus diperlakukan sama dengan warga sipil.¹³³

4.5.2. Pendapat RM. Pangabean

Pandangan dari RM. Pangabean (mantan pejabat senior di Divisi Hukum Mabes POLRI) bahwa latar belakang pemberian bantuan hukum di POLRI untuk Anggota POLRI dan keluarganya adalah tidak dapat dipisahkan dengan aturan yang berlaku di lingkungan ABRI, yakni berkaitan dengan UU RI. No. 20 tahun 1982 tentang pertahanan dan dijabarkan dengan PP RI No. 6 tahun 1986 yang susbtansinya untuk dasar pemberian bantuan hukum dilakukan oleh pembina fungsi hukum yaitu di bagian hukum baik di POLRI maupun di ABRI. Anggota tidak mungkin menggunakan jasa hukum di luar institusi, karena keterbatasan keuangan. Tujuan pemberian bantuan hukum adalah untuk

¹³³ Artidjo Alkostar, (Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung RI), Wawancara, Mahkamah Agung RI, Jakarta, tanggal 19 Maret 2013.

memberikan jaminan kesejahteraan bagi Anggota POLRI dan keluarganya, mengingat bentuk kesejahteraan tidak hanya berupa kesejahteraan fisik saja, tetapi juga dapat berupa kesejahteraan pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya, **agar memperoleh ketenangan dalam menghadapi permasalahan hukum.** Bahkan pemberian bantuan hukum mengalami perkembangan perluasan yang meliputi : pemberian bantuan yang semula hanya berkaitan dengan tugas POLRI, namun sekarang termasuk keluarganya, dan badan hukum yang berafiliasi dengan POLRI (yayasan Brata Bhakti, Primkopol) yang diluar struktur institusi POLRI.

Pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya, jika dihubungkan dengan Pasal 31 UU RI No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, hasil uji materiil dari Mahkamah Konstitusi Pasal 31 tersebut di atas sudah dicabut, maka Pemberian bantuan hukum terhadap Anggota POLRI dan keluarganya tidak dilarang, **dengan pertimbangan** sebagai berikut : setiap Anggota POLRI memiliki hak untuk dilindungi oleh UUD Negara RI 1945, Konvensi Internasional dan peraturan hukum, institusi POLRI yang lebih mengetahui atas semua kesulitan/hambatan yang terdapat di lingkungan POLRI serta besarnya risiko pelaksanaan tugas dari Anggota POLRI yang harus dihadapi termasuk risiko hukum.

Pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI tidak ada larangan, jika didasarkan kepada setiap UU yang ada, berlaku juga asas *Open Legal System* yang berarti UU pada prinsipnya berlaku secara umum, namun tidak ada larangan UU juga dapat berlaku secara khusus. Dibentuknya UU secara khusus tentang pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya karena : **mengakomodir kepentingan di internal POLRI dan**

memperjelas aturan hukum yang ada, dapat dilakukan melalui kebijakan formulasi terhadap Pasal 26 ayat (1) ayat (2) Pasal 29 ayat (1) ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, maupun dalam RUU Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas di legislatif.¹³⁴

4.5.3. Pendapat Otto Hasibuan

Pandangan Otto Hasibuan (Ketua Peradi Pusat periode Tahun 2013) menyatakan bahwa Konsep Kebijakan Formulasi bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya. Konsep Kebijakan Formulasi bantuan hukum dalam hal ini identik dengan kebijakan dalam memformulasikan pembuatan peraturan undang-undang tentang bantuan hukum bagi Anggota POLRI atau kebijakan legislatif/kebijakan legislasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu yang dalam hal ini terkait dengan kekosongan hukum tentang UU bantuan hukum Anggota POLRI dan keluarganya dan kemudian mengimplementasikan UU tersebut. Bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya dapat dilakukan oleh Advokat profesional atau bidang hukum secara khusus mendaftarkan bidang hukum Polri kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM agar mendapatkan pengesahan dalam memberikan bantuan hukum khususnya bagi Anggota POLRI.¹³⁵

Mengenai Kebijakan Formulasi Bantuan Hukum yang Integratif di lingkungan Polri bagi Anggota POLRI dan keluarganya dan kebijakan formulasi

¹³⁴ RM. Panggabean, (mantan pejabat senior di Divisi Hukum Mabes POLRI), wawancara, Jakarta, hari Selasa tanggal 29 Januari 2013.

¹³⁵ Otto Hasibuan, Wawancara, Jawaban Tertulis, Kantor Peradi, Jakarta, Juni 2013.

bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya dalam pembaruan UU Polri yang akan datang sebagai berikut :

- a. Perlu adanya kerjasama antara Bidang Hukum Polri dengan organisasi Advokat yang diberikan wewenang oleh UU Advokat untuk memberikan izin bagi Bidang Polri dalam membela Anggota POLRI;
- b. Perlu adanya Bidang Bantuan Hukum yang secara khusus memberikan bantuan hukum secara prodeo/cuma-cuma bagi Anggota POLRI dan keluarganya dengan mendaftarkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM.

4.5.4. Pendapat Andi Mattalatta

Berdasarkan Risalah Rapat Proses Pembahasan RUU tentang POLRI (ANDI MATTALATTA selaku Ketua Rapat tahun sidang 2000-2001 hari selasa tanggal 18 September 2001). Proses pembahasan RUU tentang POLRI sebagai berikut ¹³⁶:

1. Keberadaan pengadilan militer tetap ada, tetapi sejak berlakunya undang-undang ini, maka Anggota Kepolisian yang terlibat dalam kasus-kasus hukum baik pidana atau perdata dia **sudah tunduk kepada peradilan umum** termasuk juga kasus-kasus pelanggaran disiplin yang nanti diatur dengan Peraturan Pemerintah mengenai tahapan-tahapan proses perpindahan dan peralihan itu, tetapi ketentuan di dalam Pasal 43 itu lebih rinci mengatur soal ini, pada saat undang-undang ini boleh berlaku dalam

¹³⁶ Studi Dokumentasi terhadap Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia Rabu tanggal 30 Januari 2013 di kantor Biro Humas DPR Pusat di Jakarta.

huruf (B) dikatakan perkara pidana yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara RI yang sedang diperiksa dan belum memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, berlaku ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer. Jadi sedang diperiksa mungkin sudah diputus pada pengadilan militer, tingkat I dalam proses banding atau kasasi, dia dalam proses banding atau kasasi sama ke Mahkamah Agung itu tetap tunduk kepada peradilan militer;¹³⁷

2. Kepolisian tidak lagi seperti militer adalah dengan menempatkannya lembaga Kepolisian sebagai masyarakat sipil, dimana setiap Anggota Kepolisian tunduk, taat dan berada dalam lingkungan peradilan umum. Yang perlu dirumuskan berikutnya adalah bagaimana dan siapa yang melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana. Apakah oleh atasan langsungnya atau oleh Provost POLRI, kami mengusulkan perlunya dibentuk suatu lembaga penyelidik dan penyidik khusus di lingkungan POLRI yang bertugas secara permanen dan spesifik menangani kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan Anggota POLRI.¹³⁸

4.5.5. Pendapat Yusril Ihza Mahendra

Sambutan pemerintah atas persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang POLRI **menjadi** UU tentang POLRI (oleh MENKEH DAN HAM RI /Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra) adalah sebagai berikut : "Hal yang juga sangat penting dalam undang-undang yang sekarang ini adalah bahwa **POLRI tunduk pada sistem**

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 1254

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 1706

peradilan umum, dengan demikian pengawasan kinerja institusi dan Anggota POLRI dilakukan oleh sistem kontrol sosial yaitu pengawasan langsung oleh rakyat dan POLRI mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dengan masyarakat, sehingga dapat meminimalkan peluang penyalahgunaan kewenangan (tercantum pada angka 5 halaman 1726).¹³⁹

4.6. Kebijakan formulasi Perumusan Norma Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga Polri di masa mendatang

Konsep rumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI di masa mendatang (*Ius Constituendum*) sebagai berikut :

berdasarkan hasil penelitian sebagai jawaban permasalahan kedua dengan mengkaji bahan-bahan hukum, antara lain : pengaturan bantuan hukum beberapa konvensi internasional, pengaturan bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Kepolisian beberapa Negara, pengaturan bantuan hukum dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia (pengaturan bantuan hukum yang berlaku umum dan pengaturan bantuan hukum yang berlaku khusus), implimentasi bantuan hukum dalam praktik peradilan di lembaga POLRI dan pendapat para ahli tentang pemberian bantuan hukum.

Konsep rumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI di masa mendatang tersebut dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pengaturan bantuan hukum beberapa konvensi internasional, pengaturan bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Kepolisian beberapa Negara, pengaturan bantuan hukum dalam peraturann perundang – undangan di Indonesia (pengaturan bantuan hukum yang berlaku umum dan pengaturan bantuan hukum yang berlaku khusus), implimentasi bantuan hukum dalam

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 1726.

praktik peradilan di lembaga POLRI dan pendapat para ahli tentang pemberian bantuan hukum dengan membandingkan rumusan norma yang berlaku di Kepolisian Negara Philipina dan Kepolisian Negara Thailand serta institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dbandingkan dengan rumusan norma Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Rumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI belum mengatur norma bantuan hukum, namun hanya di atur dalam PP RI No. 3 Tahun 2003 dan PP RI No. 42 Tahun 2010 serta norma PERKAP No. 2 Tahun 2017, karena Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri merupakan jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang, sehingga daya berlakunya tidak kuat. Selanjutnya penulis mengusulkan untuk menambahkan atau menyisipkan satu Pasal 26 A UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang substansinya : "Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan", konsep rumusan norma bantuan hukum yang lebih menjamin adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat khususnya bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI.

Pembahasan konsep rumusan norma bantuan hukum akan dibagi menjadi dua yaitu : (1) letak rumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI dalam UU POLRI dan (2) rumusan norma bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI.

4.6.1. Letak rumusan Norma Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI dalam UU POLRI

Rumusan asli UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI Pasal 26 ayat (1) "Setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan

hak-hak lainnya yang adil dan layak”; dan ayat (2) “Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Dalam perumusan Norma Bantuan Hukum Bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI di masa mendatang, penulis mengusulkan untuk menambahkan atau menyisipkan satu Pasal 26 A UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang substansinya : “Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan”. Usulan peletakan rumusan norma bantuan hukum dalam Undang-Undang POLRI dengan dasar pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari **Kajian yuridis** :
 - a. Membandingkan pengaturan bantuan hukum **di beberapa negara** yaitu :
 - 1). Untuk Kepolisian Negara Philippina, ketentuan bantuan hukum bagi setiap anggota PNP (*The Philippine National Police*) yang menghadapi perkara hukum diatur di dalam Bagian 56. Pasal 49 dari UU Republik No 6975. Perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi Petugas Polisi Kerajaan Thailand (*Thailand State Police Officer*) diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (*the criminal code and criminal procedure code*), khusus Peraturan Polisi, terdapat dalam Bab 2 Pasal 3. Secara struktural fungsi bantuan hukum pada Polisi Kerajaan Thailand adalah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Hukum dan Perundang-undangan Polisi Kerajaan Thailand.

- 2). Bantuan hukum sebagai bagian dari profesi advokat diatur dalam *Eight United Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* bagian B. *Other Instruments Adopted by The Congress* tepatnya pada bagian 3. *Basic Principles on The Role of Lawyer and Legal Services*. Menurut dokumen itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana yang cukup untuk memberikan jasa hukum bagi orang miskin dan orang yang memerlukan karena posisinya yang lemah.
- b. pengaturan bantuan hukum dalam sebuah peraturan perundang-undangan **di Indonesia** yaitu :
- 1). UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atur pada Pasal 54 "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat **bantuan hukum** dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam UU ini".
 - 2). UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di atur pada Pasal 50 ayat (2) "Prajurit dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi : huruf (f) **bantuan hukum**"; dan Ayat (3) "Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi huruf (c) bantuan hukum"
 - 3). UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di atur pada Pasal 10 ayat (1)

huruf e yang menyatakan "Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi : salah satu alasannya adalah **untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat**".

Pelaksanaan tugas POLRI menjadi semakin berat dan memiliki beberapa risiko, termasuk risiko hukum atas tindakan Anggota POLRI, yang dapat berpengaruh pada kondisi keluarga POLRI. Mengingat jumlah Anggota POLRI saja di Polda Jatim dalam periode Tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 kurang lebih 42.898 (empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan ribu) orang Anggota POLRI. Apalagi terhadap jumlah Anggota POLRI seluruh Indonesia kurang lebih 419.213 (empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga belas ribu orang Anggota POLRI, tentunya berjumlah lebih besar, maka dengan jumlah yang besar itu patut dan wajar menjadi pertimbangan pemberian bantuan hukum dari pelayanan dinas di lembaga POLRI. Dengan demikian menurut Penulis terkait dengan bantuan hukum di Lembaga POLRI bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI, maka materi muatan norma **perlu untuk ditingkatkan kedudukan/peletakan pengaturan dari Peraturan Kapolri (PERKAP) dan Peraturan Pemerintah RI, selanjutnya dilakukan penguatan kedudukan/peletakan rumusan norma ke dalam Undang-Undang.** Klasifikasi pengaturan rumusan norma bantuan hukum di Lembaga POLRI, bentuknya harus dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku khusus. Upaya yang perlu segera dilakukan menurut prosedur

hukum yang benar adalah melalui Kebijakan formulasi bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI.

2. Ditinjau dari **kajian teoritik** sebagai pisau analisis permasalahan disertasi yang kedua yaitu :

a. Teori jenjang norma dari **Hans Kelsen** dengan *stufen bau Theorie* menurut teori ini adalah peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam suatu negara adalah merupakan suatu norma hukum yang berjenjang. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, dimana norma yang di bawah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*) yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya. Maka perlu melakukan peletakan rumusan bantuan hukum bagi anggota POLRI dan keluarga POLRI yaitu dalam Undang-Undang POLRI tidak di dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri, seperti yang berlaku sekarang ini. Selanjutnya perlu tindakan konkrit, agar tidak bertentangan/menyalahi jenis dan hierarki peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota". (Bab II, sub bab : 2.1.1.3.3.).

b. Teori Kebijakan Formulasi dari **Barda Nawawi Arief** menyimpulkan bahwa politik hukum pidana identik dengan pengertian "Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana". Jika dilihat dalam arti luas ruang lingkup kebijakan hukum pidana mencakup (kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana). Selain itu **kebijakan hukum pidana (*penal policy*)** sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, merupakan perwujudan dari proses 3 (tiga) tahapan kebijakan yakni :

- 1). Tahap **penetapan** kebijakan (tahap formulasi) atau kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang;
- 2). Tahap **penerapan** kebijakan (tahap aplikasi), yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai dengan Pengadilan;
- 3). Tahap **pelaksanaan** kebijakan (tahap eksekusi), yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. (Bab II, sub bab : 2.1.1.3.2.).

3. Ditinjau dari **Landasan historis** ada pertimbangan atau alasan yaitu :
Bahwa peraturan yang dibentuk harus mempertimbangkan pemberian bantuan hukum dari Lembaga POLRI kepada anggota POLRI dan keluarga

POLRI, mengingat sebelumnya sudah dilaksanakan sejak Lembaga POLRI masih bagian integral dengan TNI yang disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang tunduk pada Peradilan Militer, selanjutnya pasca reformasi Lembaga POLRI tunduk pada Peradilan Umum tetap ada Devisi Hukum di Mabes POLRI di Jakarta, Bidang Hukum di tingkat Polda dan Bagian Hukum di tingkat Polrestabes/Polres di seluruh Indonesia untuk pelayanan pemberian bantuan hukum sampai dengan sekarang ini.

Dengan berlakunya UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI pada Pasal 29 ayat (1) " Anggota POLRI tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum ", sebagai konsekuensi hukum dengan tunduknya anggota POLRI pada kekuasaan Peradilan Umum, maka semua peraturan yang berhubungan dengan Hukum Militer baik hukum materiil dan hukum formal yang diberlakukan kepada anggota TNI dinyatakan tidak berlaku lagi bagi anggota POLRI.

4. Ditinjau dari **Landasan sosiologis** ada pertimbangan sebagai berikut :

Perbandingan Tugas dan wewenang antara POLRI dengan TNI adalah sama-sama berat, maka tidak berlebihan untuk memberikan bantuan hukum bagi anggota POLRI seimbang dengan TNI, pelaksanaan tugas POLRI tentunya menjadi semakin berat dan memiliki beberapa risiko, termasuk risiko hukum (masuk penjara), bahkan risiko kematian dalam menjalankan tugas dan wewenang atas tindakan anggota POLRI, yang dapat berpengaruh pada kondisi keluarga POLRI, secara detail yaitu :

- a. Pelaksanaan tugas anggota POLRI semakin kompleks dan berat;
- b. Jumlah anggota POLRI yang besar sebagai contoh di Polda Jatim dalam periode Tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 kurang lebih 42.898 (empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan

puluh delapan ribu) orang anggota POLRI. Apalagi jumlah anggota POLRI seluruh Indonesia kurang lebih 419.213 (empat ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga belas ribu orang anggota POLRI;

- c. Polisi harus yakin betul, seseorang bersalah, karena risiko yang dihadapinya tidak kecil. Kecuali risiko hukum, seperti salah tangkap dan praperadilan, ia juga menghadapi risiko sosiologis, seperti perlawanan yang bahkan bisa sampai mengorbankan nyawanya. Oleh karena itu Polisi tidak main-main melakukan penangkapan/penahanan itu. Dengan demikian, sebelum ia memutuskan untuk bertindak, dalam kepalanya sudah berputar SPP (Sistem Peradilan Pidana), yaitu menahan, memeriksa dan kemudian mengadili dan menghukum seseorang.

Oleh karena itu adanya beragam risiko (risiko hukum, risiko sosiologis dan risiko mati) dan jumlah yang besar bagi anggota POLRI, maka patut dan wajar menjadi pertimbangan kepada anggota POLRI dan keluarga POLRI mendapat perolehan rawatan dan pelayanan kedinasan bantuan hukum dari POLRI.

5. Ditinjau dari **Pendapat Ahli**

- a. Pendapat **Artidjo Alkostar** yakni : Pemberian bantuan hukum kepada Anggota POLRI dan keluarganya dalam keadaan darurat dapat dibenarkan untuk diberikan oleh institusi POLRI, dengan alasan : terhadap kasus kasus tertentu, kebutuhan institusional, diberikan dengan cuma cuma, dilakukan secara tidak komersial dilingkungan POLRI bukan untuk jasa Advokat secara umum dan yang terpenting

memenuhi kualifikasi dalam UU Advokat dan UU Bantuan Hukum. Faktanya para Advokat tidak menjangkau kebutuhan pemenuhan pemberian bantuan hukum yang lebih luas termasuk yang dibutuhkan bagi Anggota POLRI dan keluarganya, oleh karena itu UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat harus direvisi dengan alasan yang mendasar adalah peranan Advokat yang monopoli dalam pelayanan hukum khususnya pemberian bantuan hukum. Selanjutnya harus dilakukan **kebijakan normatif** yang diselaraskan dengan realita pelayanan hukum dan pemberian bantuan hukum.

b. Pendapat **RM. Pangabean** yakni : Pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI tidak ada larangan, jika didasarkan kepada setiap UU yang ada, berlaku juga asas *Open Legal System* yang berarti UU pada prinsipnya berlaku secara umum, namun tidak ada larangan UU juga dapat berlaku secara khusus. Dibentuknya UU secara khusus tentang pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya karena : mengakomodir kepentingan di internal POLRI dan memperjelas aturan hukum yang ada, dapat dilakukan melalui kebijakan formulasi terhadap Pasal 26 ayat (1), ayat (2), Pasal 29 ayat (1), ayat (2) UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, maupun dalam RUU Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas di legislatif.

c. Pendapat **Otto Hasibuan** yakni : Bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya dapat dilakukan oleh Advokat profesional atau bidang hukum secara khusus mendaftarkan bidang hukum Polri kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM agar

mendapatkan pengesahan dalam memberikan bantuan hukum khususnya bagi Anggota POLRI.

6. Ditinjau dari **Landasan Filosofis** ada pertimbangan atau alasan sebagai berikut :

a. Teori Hak Asasi Manusia dari **Soenawar Soekawati** berpendapat tentang pengertian prinsip *equality before the law* dalam pengertian Pancasila mempunyai perbedaan dengan prinsip yang dianut oleh negara-negara demokrasi barat, yaitu bahwa persamaan kedudukan dan kebebasan di Indonesia, adalah kebebasan yang bertanggung jawab artinya, Hak Asasi Manusia tidak bersifat mutlak, karena setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah berhak mengambil tindakan kepada warganya asalkan dapat dipertanggungjawabkan. (Bab II, sub bab : 2.1.1.1.1.).

b. Pengaturan hak asasi manusia dijadikan sebagai alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, ketika warga negara dihadapkan pada ancaman yang ditimbulkan oleh kekuasaan negara, maka melalui undang-undang ini yang diamanatkan dalam konsiderans maka akan dijamin adanya perlindungan hak asasi manusianya, sebagai pelaksanaan dari sila-sila dalam Pancasila. Sebagai pelaksanaan prinsip *equality before the law* dalam pengertian Pancasila, maka persamaan kedudukan dan kebebasan di Indonesia, adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

c. Pembukaan yang mendasari Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah yakni mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum,

negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945.

d. Keberadaan bantuan hukum cukup strategis dalam mewujudkan upaya perlindungan hukum dan perlindungan hak-hak asasi manusia, bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem peradilan pidana, mengingat kepentingan HAM tidak hanya menyangkut kepentingan negara semata, tetapi juga menyangkut kepentingan warga negara. Hak Asasi Manusia yang seutuhnya itu bersumber pada pertimbangan normatif agar manusia diperlakukan sebagaimana martabat manusia yang sesungguhnya; dan Operasionalisasi kegiatan Hak Asasi Manusia memiliki tanggung jawab bersama antara manusia dalam struktur negara yang saling harus berinteraksi dan harus diwujudkan.

e. Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakkan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, persamaan kedudukan hukum dan perlindungan hukum serta HAM, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum.

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya pemberian bantuan hukum ini merupakan hak asasi yang berlaku pada tiap tingkatan pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana.

Keberlakuan ketentuan pemberian bantuan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut dapat ditujukan kepada siapapun termasuk bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI, yang karena keadaan tertentu terlibat dalam perkara pidana atau menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana tertentu yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih. Dengan kata lain ketentuan pemberian bantuan hukum tersebut berlaku secara umum bagi siapapun yang memenuhi kriteria Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pemberian bantuan hukum di Lembaga POLRI kepada Anggota POLRI sudah dilaksanakan sejak Lembaga POLRI masih bagian integral dengan TNI yang disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang tunduk pada Peradilan Militer, selanjutnya pasca reformasi Lembaga POLRI tunduk pada Peradilan Umum yang dilaksanakan oleh fungsi Devisi Hukum di tingkat Markas Besar POLRI di Jakarta dan Bidang Hukum di tingkat Polda serta Bagian Hukum di tingkat Polrestabes/Polresta/Polres seluruh Indonesia untuk pemberian bantuan hukum sampai dengan sekarang ini.

4.6.2 Rumusan Norma Bantuan Hukum bagi Anggota POLRI dan Keluarga POLRI

Berdasarkan rumusan norma bantuan hukum, maka subjek hukum yang mendapat pemberian bantuan hukum, belum diatur dalam rumusan asli UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI Pasal 26 ayat (1) "Setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak"; dan ayat (2) "Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Oleh karena itu penulis mengusulkan untuk menambahkan atau menyisipkan satu Pasal 26 A dalam UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang substansinya : "Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI berhak memperoleh rawatan dan layanan kedinasan Bantuan Hukum di dalam peradilan maupun di luar peradilan".

Selanjutnya akan dilakukan kajian lebih mendasar rumusan norma bantuan hukum berkaitan **subjek hukum** dengan kata "Setiap Anggota POLRI dan keluarga POLRI" sebagai berikut :

1. Ditinjau dari **kajian yuridis**
 - a. Membandingkan pengaturan bantuan hukum **di beberapa negara** yaitu : Untuk Kepolisian Negara Philippina, ketentuan bantuan hukum bagi setiap anggota PNP (*The Philippine National Police*) yang menghadapi perkara hukum diatur di dalam Bagian 56. Pasal 49 dari UU Republik No 6975. Perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi Petugas Polisi Kerajaan Thailand (*Thailand State Police Officer*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (*the criminal code and criminal procedure code*). Khusus untuk keluarga Polisi tidak di atur dalam UU Republik Kepolisian Negara Philippina dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana Kepolisian Negara Thailand.
 - b. Pengaturan bantuan hukum dalam sebuah peraturan perundang-undangan **di Indonesia** yaitu : UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di atur pada Pasal 50 ayat (2) "**Prajurit** dan prajurit siswa memperoleh rawatan dan layanan kedinasan yang meliputi : huruf (f) bantuan hukum"; dan Ayat (3)

"**Keluarga prajurit** memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi huruf (c) bantuan hukum". Hal ini untuk pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarga POLRI tidak di atur pada UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

2. Ditinjau dari **kajian teoritik** sebagai pisau analisis yaitu :

a. Teori Negara Hukum Menurut **Padmo Wahjono** berdasarkan petunjuk-petunjuk dari UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan, konsep Negara Hukum Indonesia adalah :

1. Hukumnya bersumber dari Pancasila;
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara tertinggi, dimana presiden sebagai mandatarisnya bersama-sama DPR sebagai bagian dari MPR, merupakan pembentuk peraturan perundang-undangan;
3. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme;
4. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah;
5. **Setiap warganegara** bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali;
6. Bahwa hukum yang bersumber pada Pancasila dan memberikan kesamaan hak dan kewajiban harus berfungsi pengayoman. (Bab II, sub bab : 2.1.1.2.1.).

b. Teori keadilan menurut **John Rawls** yakni : Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*), dan Teori Keadilan Kumutatif dan Teori Keadilan Protektif. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada **setiap manusia** sehingga tidak seorangpun yang mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang. Hal ini menurut penulis makna kata "Setiap manusia" dan "Setiap warganegara" adalah siapapun tanpa terkecuali termasuk Anggota POLRI dan keluarga POLRI. (Bab II, sub bab : 2.1.1.2.2.).

c. Teori Sistem Peradilan Pidana oleh **Remington dan Ohlin** menyatakan bahwa *Criminal Justice System* adalah pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai sistem merupakan interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien. Untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, diharapkan dalam melaksanakan tugasnya harus mampu melaksanakan cita-cita peradilan pidana. Cita-cita peradilan pidana ini disebut dengan istilah *due process of law* (proses hukum yang adil atau layak) yang merupakan lawan dari *arbitrary process* (proses yang sewenang-wenang atau semena-mena berdasarkan kuasa penegak hukum). Secara keliru arti dari *due process of law* ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana pada seorang tersangka atau terdakwa saja, padahal istilah ini memiliki arti yang lebih luas dari sekedar penerapan peraturan perundang-undangan saja, karena mengandung juga makna penghormatan terhadap setiap warga masyarakat. Karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik mereka yang menjadi korban, yang bertindak sebagai saksi, termasuk tersangka/terdakwa harus diberikan hak-hak yang memadai, agar dapat terciptanya suatu peradilan yang adil. (Bab II, sub bab : 2.1.1.3.1.).

3. Ditinjau dari **Pendapat Ahli**

a. Pendapat **Artidjo Alkostar** yakni : setiap warga negara sebagaimana dalam UU Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dalam penegakan hukum dan pemberian pelayanan hukum, maka tidak dapat dipisahkan antara warga sipil dan Anggota POLRI/ABRI. Bahwa inti dari hukum adalah keadilan, tidak boleh ada orang di Indonesia ini diproses hukum yang mengabaikan pemberian pelayanan hukum yang wajar. Dalam penegakan hukum berlakunya asas *fairness fair* adalah harus ada perhatian kepada kepada setiap orang baik terdakwa, tergugat, penggugat termasuk Anggota POLRI dalam semua tingkat pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. Bantuan hukum adalah bagian dari implementasi tentang penegakan keadilan. Pada prinsipnya setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang benar dan adil, dalam ilmu hukum disebut *Due Process of Law*.

b. Pendapat **RM. Pangabean** yakni : latar belakang pemberian bantuan hukum di POLRI untuk Anggota POLRI dan keluarganya adalah tidak dapat dipisahkan dengan aturan yang berlaku di lingkungan ABRI, yakni berkaitan dengan UU RI. No. 20 tahun 1982 tentang pertahanan dan dijabarkan dengan PP RI No. 6 tahun 1986 yang susbtansinya untuk dasar pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh pembina fungsi hukum yaitu di bagian hukum baik di POLRI maupun di ABRI. Anggota tidak mungkin menggunakan jasa hukum di luar institusi, karena keterbatasan keuangan. Tujuan pemberian bantuan hukum adalah untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi Anggota POLRI dan

keluarganya, mengingat bentuk kesejahteraan tidak hanya berupa kesejahteraan fisik saja, tetapi juga dapat berupa **kesejahteraan pemberian bantuan hukum bagi Anggota POLRI dan keluarganya**, agar memperoleh ketenangan dalam menghadapi permasalahan hukum. Bahkan pemberian bantuan hukum mengalami perkembangan perluasan yang meliputi : pemberian bantuan yang semula hanya berkaitan dengan tugas POLRI, namun sekarang termasuk keluarganya, dan badan hukum yang berafiliasi dengan POLRI (yayasan Brata Bhakti, Primkopol) yang diluar struktur institusi POLRI.

Penulis memberikan batasan kata atau istilah "Anggota POLRI" pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI untuk kata atau istilah "Anggota POLRI" adalah pegawai negeri pada POLRI. Selanjutnya diperjelas pada Bab IV Anggota POLRI Pasal 20 ayat (1) Pegawai Negeri pada POLRI terdiri atas : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka menurut penulis makna subjek hukum "Anggota POLRI" meliputi : anggota POLRI dan pegawai negeri sipil di lingkungan POLRI. Sedangkan subjek hukum "Keluarga POLRI" penulis akan memberikan batasan kata atau istilah "Keluarga POLRI". Berpedoman penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf C UU RI No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI "Yang dimaksud Keluarga prajurit adalah istri/suami beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya menurut penulis batasan dan lingkup dari kata atau istilah "Keluarga POLRI", yakni istri/suami beserta anak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang merupakan klasifikasi keluarga

inti, berhak mendapatkan pemberian atau perolehan bantuan hukum dari lembaga POLRI.

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga POLRI kepada Anggota POLRI dan keluarganya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota POLRI, karena bentuk kesejahteraan tidak hanya berdimensi material saja, akan tetapi juga berdimensi ketenteraman bathin, ketenangan, dan kepuasan bathin dalam pelaksanaan tugas, karena adanya jaminan perlindungan hukum dan pemberian bantuan hukum dari Lembaga POLRI, jika mendapatkan atau berhadapan dengan permasalahan hukum. Perlu diketahui bahwa pemberian bantuan hukum oleh POLRI tidak serta merta diberikan, mengingat berhubungan dengan hak menggunakan atau tidak menggunakan hak bantuan hukum,

Setiap peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut permasalahan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa permasalahan hukum itu antara lain : peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturan yang tidak sinkron antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah (sebaliknya), **jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah**, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya sama sekali belum ada.

Penulis menetapkan terdapat inkonsistensi pengaturan norma sehingga terjadi **ketidaksesuaian secara vertikal** dalam pengaturan (antara UU RI No.

2 Tahun 2002 tentang POLRI, PPRI No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota POLRI, dan PP RI No. 42 Tahun 2010 tentang Hak–Hak Anggota POLRI, serta PERKAP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh POLRI. Peraturan tersebut di atas adalah masih bersifat peraturan teknis, maka terhadap peraturan yang belum jelas, untuk menentukan kejelasan tidak boleh ditafsirkan, salah satu solusi hukumnya adalah **melalui kebijakan formulasi Undang-Undang**.

Bantuan hukum di lingkungan TNI sudah berjalan sesuai aturan hukum, dapat menjadi pedoman bagi POLRI. Perlu dipahami POLRI secara khusus dalam tingkat pelaksanaan atau operasionalnya POLRI dibutuhkan rumusan norma bantuan hukum yang tepat, agar dalam melakukan peranannya benar-benar sejalan dengan misi Kepolisian dan Etika Kepolisian. Para Cendekiawan POLRI hendaknya dapat merumuskan perihal norma pemberian bantuan hukum secara benar dan optimal sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi Anggota POLRI dan keluarga POLRI.